

ANALISA LAPANGAN



**KEBAKARAN GAMBUT
DI WILAYAH TERINTERVENSI
RESTORASI DI RIAU**



**pantau
gambut**

Wisma PMI 3rd Floor, Jl. Wijaya I No. 63,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, Indonesia
P : +62 (21) 22775816 F : +62 (21) 22775825

 www.pantaugambut.id  Pantau Gambut
 @pantaugambut  pantaugambut

Pantau Gambut adalah wadah atau platform daring yang menyediakan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

DAFTAR ISI

01	IKHTISAR	1
	PENDAHULUAN	4
	LATAR BELAKANG	4
	RUMUSAN MASALAH	6
	METODE DAN PERIODE PENGAMBILAN DATA	6
10	PEMBAHASAN	10
	TEMUAN DAN ANALISIS PER LOKASI	11
	1. Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai	11
	2. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis	15
	3. Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupal, Kabupaten Bengkalis	15
	4. Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupal, Kabupaten Bengkalis	16
	5. Kelurahan Pergam, Kecamatan Rupal, Kabupaten Bengkalis	18
	6. Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis	20
	7. Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	22
	8. Desa Sei Sigajah (Sungai Sigajah/Segajah), Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir	24
	9. Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir	26
	10. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir	28
	TIPOLOGI KEBAKARAN GAMBUT DI WILAYAH TERINTERVENSI RESTORASI DI RIAU	30
	PERSEPSI MASYARAKAT	32
34	PENUTUP	34
	KESIMPULAN	34
	REKOMENDASI	35

IKHTISAR

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) TERJADI DI RIAU SEJAK AWAL TAHUN 2019 DI WILAYAH GAMBUT YANG TELAH ATAU SEHARUSNYA TELAH MENDAPAT INTERVENSI RESTORASI.

Pantauan citra satelit juga menunjukkan bahwa banyak titik panas muncul di wilayah yang telah dilakukan intervensi restorasi gambut berupa pembasahan. Wilayah-wilayah tersebut antara lain adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten-kabupaten ini merupakan wilayah dengan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang menjadi prioritas restorasi gambut.



Untuk mengetahui lebih dalam korelasi antara restorasi gambut dan masih munculnya titik panas di wilayah restorasi, tim Simpul Jaringan Pantau Gambut melakukan penelusuran di 10 desa/kelurahan di Riau di mana hotspot terpantau dan kegiatan restorasi diperkirakan telah berjalan. Kesepuluh desa/kelurahan tersebut adalah:

- a. Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai
- b. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- c. Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- d. Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- e. Kelurahan Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis



- f. Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis
- g. Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti
- h. Desa Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir
- i. Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir
- j. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Di 10 desa/kelurahan tersebut, tim menelusuri sejumlah infrastruktur pembasahan restorasi gambut berupa 74 sekat kanal dan 34 sumur bor. Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi mendalam dari aparat desa dan warga di desa-desa tersebut, tim membuat tipologi faktor-faktor yang menyebabkan karhutla di wilayah yang sudah atau seharusnya sudah mendapat intervensi restorasi gambut. Tipologi tersebut adalah:

- a. Wilayah terintervensi restorasi masih terbakar karena infrastruktur pembasahan belum dapat memulihkan kondisi gambut yang kering
- b. Wilayah terintervensi restorasi masih terbakar karena upaya pencegahan berbasis masyarakat, seperti MPA, terkendala dana operasional, sedangkan upaya penanggulangan terkendala lokasi yang jauh dan peralatan yang terbatas.
- c. Wilayah terintervensi restorasi gambut masih mengalami kebakaran di daerah yang jauh dari lokasi infrastruktur pembasahan dibuat atau lokasi infrastruktur pembasahan gambut tidak berada di wilayah yang rentan terbakar
- d. Wilayah yang seharusnya sudah mendapat intervensi restorasi masih terbakar karena rencana restorasi belum terealisasi

Tim Pantau Gambut berharap tipologi tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran gambut masih terjadi di wilayah terintervensi restorasi gambut dan mendorong perbaikan dalam implementasi kegiatan-kegiatan restorasi ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan pembagian tipologi tersebut, rekomendasi yang dapat diajukan kepada seluruh pemantau kepentingan antara lain adalah:

- a. Pelaksanaan restorasi gambut harus dapat dipastikan sesuai perencanaan untuk menghindari kebakaran karena keterlambatan implementasi restorasi
- b. Memastikan bahwa infrastruktur pembasahan gambut dibangun di area rawan kebakaran
- c. Perlunya ada indikator pulih yang dapat digunakan publik secara umum
- d. Memastikan pemeliharaan atas infrastruktur yang telah terbangun
- e. Memperkuat patroli dan pencegahan karhutla yang dilakukan di tingkat tapak
- f. Memastikan tersedianya alokasi dana pencegahan karhutla tingkat desa/kelurahan
- g. Mendorong desa/atau kelurahan membuka kerjasama dengan lembaga sumber pendanaan non-anggaran lainnya
- h. Supervisi dan penegakan peraturan atas rencana restorasi di wilayah konsesi
- i. Meningkatkan implementasi Padiatapa sebelum pembangunan infrastruktur dilakukan
- j. Sosialisasi pencegahan karhutla dilakukan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal



Foto: Lokasi Bekas Kebakaran pada Maret 2019 di Kelurahan Terkul, Rupert. Koordinat N 1° 43' 24.442" E 101°35'20.227"

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus terulang di Indonesia dan menyebabkan krisis lingkungan yang berdampak buruk terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setelah karhutla yang menghancurkan 2,6 juta hektar lahan pada 2015, pemerintah Indonesia menggulirkan sejumlah kebijakan untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah kebijakan restorasi 2 juta hektar lahan gambut selama periode 2016 hingga 2020. Kebijakan restorasi ini dilaksanakan melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan pada 7 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua



Foto: Lokasi kebakaran di Teluk Makmur koordinat N 01°37'32" dan E 101°32'05

Setelah 3 tahun berjalan, BRG menyebutkan bahwa kegiatan restorasi telah berkontribusi dalam mengurangi karhutla secara signifikan.¹ Meskipun secara jumlah titik panas dan kejadian karhutla menurun, sebagian besar titik api yang terpantau citra satelit saat puncak kemarau terjadi pada Agustus 2018 ternyata berada di area prioritas restorasi gambut dan area moratorium.² Hasil tumpang susun citra satelit dengan peta konsesi saat puncak musim panas pada Juli-Agustus 2018 menunjukkan bahwa sejumlah titik panas terpantau di area izin perusahaan. Hasil analisis Pantau Gambut menunjukkan beberapa lokasi memang merupakan wilayah yang rawan kebakaran dan mengalami kejadian berulang setiap musim kemarau tiba.³ Tanpa mengesampingkan iklim sebagai faktor penting atas risiko terjadinya karhutla di suatu wilayah, titik-titik panas di area restorasi, moratorium, dan juga konsesi perusahaan menunjukkan pentingnya mendorong pelaksanaan restorasi yang tepat sasaran dan lebih melibatkan seluruh pihak. Di awal 2019, sejumlah kebakaran terjadi di Provinsi Riau. Secara

¹ <https://brg.go.id/siaran-pers-tiga-tahun-restorasi-gambut/>

² <http://pantaugambut.id/publikasi/persimpangan-jalan-restorasi-gambut>

³ *ibid*

historis, Riau merupakan lokasi 'tuan rumah' sebagian besar kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia selama 15 tahun terakhir, selain Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.⁴ Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, luas lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga 29 Maret 2019 mencapai 2.830 hektar.⁵ Sebagian besar karhutla di wilayah ini sulit dipadamkan karena terjadi di lahan gambut. Secara berurutan, wilayah dengan luasan kebakaran terbesar adalah sebagai berikut:

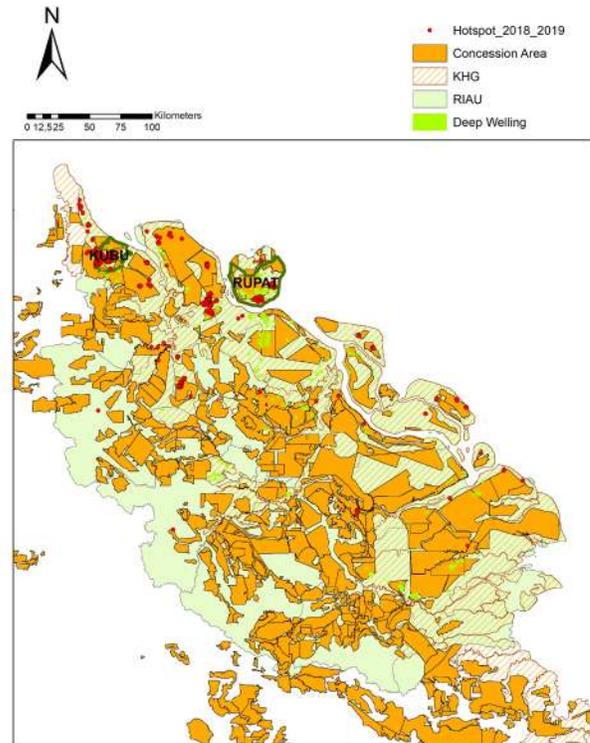
- Kabupaten Bengkalis (1.277 hektar)
- Kabupaten Rokan Hilir (436 hektar)
- Kabupaten Siak (323 hektar)
- Kepulauan Meranti (232 hektar)
- Kota Dumai (223 hektar)
- Indragiri Hilir (112 hektar)
- Kabupaten Pelalawan (77 hektar)
- Kabupaten Indragiri Hulu (64 hektar)
- Kota Pekanbaru (43 hektar)
- Kabupaten Kampar (32 hektar)

Sebagai salah satu provinsi yang menjadi lokasi prioritas restorasi gambut yang telah berjalan selama 3 tahun, berulangnya karhutla di Riau, terutama di area gambut, perlu mendapatkan perhatian serius. Terjadinya kebakaran di gambut menjadi pertanyaan awal atas efektivitas dari program-program restorasi, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembasahan kembali gambut agar tidak mudah terbakar.

Rencana restorasi 2 juta hektar lahan gambut meliputi kegiatan-kegiatan pembasahan kembali (rewetting). Pembasahan kembali bertujuan meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah gambut sehingga dapat pulih dari kondisi kering akibat aktivitas manusia. Kegiatan pembasahan kembali terdiri dari penyekatan kanal, penimbunan kanal, dan pembuatan sumur bor. Pembasahan kembali dianggap sebagai

4 <https://www.wri.org/blog/2017/02/exploring-indonesias-long-and-complicated-history-forest-fires>

5 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

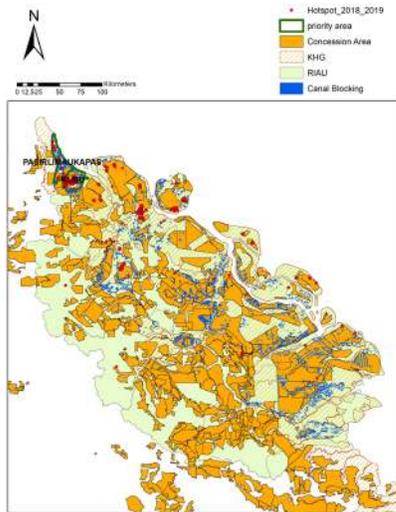


Peta: hasil tumpang susun titik panas dengan rencana pembuatan sumur bor berdasarkan Rencana Kontijensi restorasi gambut BRG 2017 dan Renana Tindak Tahunan (RTT) 2018. Lingkaran hijau dengan legenda 'priority area' merupakan area yang akan menjadi prioritas studi ini.

kegiatan restorasi hidrologis yang efektif⁶ untuk mengupayakan pemulihan tata air gambut sehingga ekosistem gambut dan bagian-bagiannya menjadi basah sehingga tidak terjadi kebakaran.

Selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Riau, kegiatan restorasi gambut telah berjalan, baik yang dilakukan melalui BRG maupun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lembaga non-pemerintah lainnya. Berdasarkan analisis awal atas data lokasi perencanaan kegiatan restorasi melalui pembasahan kembali yang ditumpang susun dengan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dari citra satelit selama

6 Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lihat juga Kasih, Rosenda Chandra, Okta Simon, Ma'mun Ansori, Muhammad Porkab Pratama, and Fenky Wirada. International Peat Congress 2016: Rewetting on Degraded Tropical Peatland By Canal Blocking Technique in Sebagau National Park, Central Kalimantan, Indonesia.



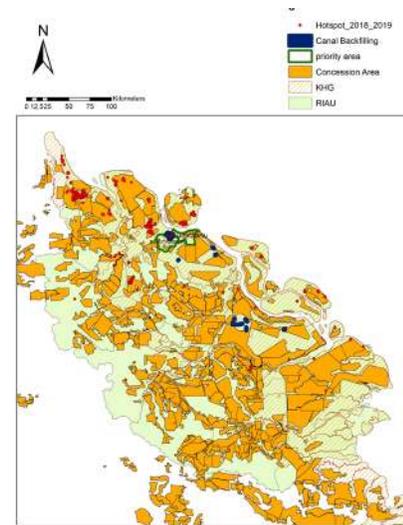
Peta: hasil tumpang susun titik panas dengan rencana pembuatan sekat kanal berdasarkan Rencana Kontijensi restorasi gambut BRG 2017 dan Rencana Tindak Tahunan (RTT) 2018. Lingkaran hijau dengan legenda 'priority area' merupakan area yang akan menjadi prioritas studi ini.

2018 dan 2019, sejumlah lokasi titik panas terlihat di wilayah di Riau yang seharusnya telah mendapat intervensi program rewetting. Dari peta-peta di atas, terlihat bahwa wilayah yang telah dilakukan intervensi restorasi gambut berupa pembasahan kembali namun masih banyak terpantau titik panas. Wilayah-wilayah tersebut antara lain adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten-kabupaten ini merupakan wilayah dengan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang menjadi prioritas restorasi gambut.

Hasil analisis spasial atas lokasi rencana restorasi dan lokasi kemunculan titik panas ini menimbulkan pertanyaan mengapa karhutla masih tetap terjadi di wilayah terintervensi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan studi yang tidak hanya berdasarkan analisis citra satelit tapi juga berbasis data-data di lapangan.

RUMUSAN MASALAH

Dari data awal berdasarkan analisis atas titik panas



Peta: hasil tumpang susun titik panas dengan rencana penimbunan kanal berdasarkan Rencana Kontijensi restorasi gambut BRG 2017 dan Rencana Tindak Tahunan (RTT) 2018. Lingkaran hijau dengan legenda 'priority area' merupakan area yang akan menjadi prioritas studi ini.

dan perencanaan restorasi gambut, analisis lanjutan diperlukan untuk menjawab pertanyaan:

- Bagaimana tipologi penyebab terjadinya kebakaran di lahan gambut yang telah mendapat intervensi restorasi hidrologis?
- Bagaimana dampak dan korelasi kegiatan restorasi lahan gambut dengan penurunan atau peningkatan terjadinya kebakaran di lahan gambut?

METODE DAN PERIODE PENGAMBILAN DATA

Untuk menjawab rumusan masalah, perlu dilakukan pengumpulan data primer terkait kondisi biofisik infrastruktur pembasahan gambut yang terletak di wilayah terjadi atau bekas terjadi karhutla. Selain itu, informasi non-biofisik, seperti faktor sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat juga diperlukan. Pengumpulan data biofisik dilakukan melalui observasi langsung atas infrastruktur pembasahan yang ada di lokasi yang ditentukan. Pengumpulan data sosial ekonomi dilakukan melalui

wawancara langsung terstruktur dengan warga. Responden dalam wawancara untuk setiap desa meliputi tiga unsur, yaitu pejabat desa setempat, Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang berpartisipasi dalam kegiatan restorasi gambut, dan masyarakat umum setempat.

Pemilihan lokasi pengambilan data dilakukan berdasarkan analisis spasial dan pemanfaatan informasi dari informan di lapangan. Berikut adalah rekapitulasi data dan peta hasil tumpang susun infrastruktur jenis sekat kanal dan sumur bor⁷, titik panas sepanjang 2018-2019, serta rencana pelaksanaan restorasi gambut dalam Rencana Kontijensi Restorasi Gambut 2017 dan Rencana Tindak Tahunan (RTT) Provinsi Riau 2018.

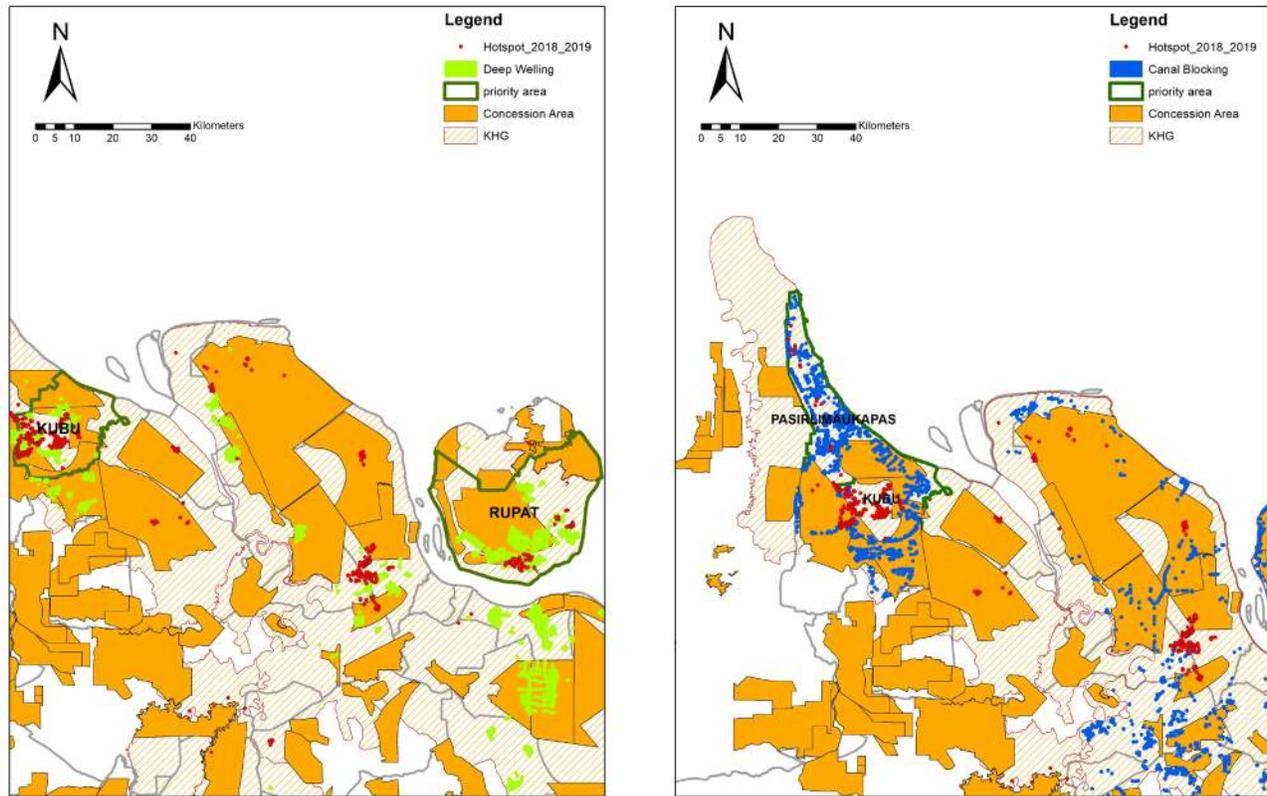
1. SEKAT KANAL

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TIPE AREA	TOTAL	TOTAL SEKAT KANAL
ROKAN HILIR	KUBU	SUNGAI SIGAJAH	Konsesi	48	55
ROKAN HILIR	KUBU	SUNGAI SIGAJAH	Nonkonsesi	13	9
ROKAN HILIR	PASIR LIMAU KAPAS	SUNGAI DAUN	Konsesi	9	167
ROKAN HILIR	PASIR LIMAU KAPAS	SUNGAI DAUN	Nonkonsesi	8	488
ROKAN HILIR	PASIR LIMAU KAPAS	PANIPAHAN LAUT	Nonkonsesi	5	72
ROKAN HILIR	KUBU	TELUK PIYAI	Nonkonsesi	4	14
ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	TANJUNG MELAWAN (blank)	Nonkonsesi	4	3
ROKAN HILIR	KUBU	TELUK NILAP	Konsesi	3	175
BENGGALIS	RUPAT	TELUK LECAH	Nonkonsesi	2	40
BENGGALIS	RUPAT	TERKUL	Nonkonsesi	2	5
KOTA DUMAI	KOTA DUMAI	(blank)	Nonkonsesi	2	1
BENGGALIS	RUPAT	SUKARJO MESIM	Nonkonsesi	1	14
ROKAN HILIR	KUBU	TELUK PIYAI	Konsesi	1	85

2. SUMUR BOR

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TIPE AREA	TOTAL HOTSPOT	TOTAL SUMUR BOR
BENGGALIS	RUPA	TERKUL	Konsesi	257	584
ROKAN HILIR	KUBU	SUNGAI SIGAJAH	Konsesi	218	216
BENGGALIS	RUPAT	TERKUL	Nonkonsesi	192	122
BENGGALIS	RUPAT	PERGAM	Konsesi	86	410
ROKAN HILIR	KUBU	SUNGAI SIGAJAH	Nonkonsesi	80	166
ROKAN HILIR	KUBU	TELUK PIYAI	Konsesi	63	151
BENGGALIS	RUPAT	TELUK LECAH	Nonkonsesi	58	205
ROKAN HILIR	KUBU	SEI SEGAJAH MAKMUR	Nonkonsesi	9	17
ROKAN HILIR	KUBU	TELUK NILAP	Nonkonsesi	7	109
BENGGALIS	RUPAT	PERGAM	Nonkonsesi	6	38
ROKAN HILIR	KUBU	SEI SEGAJAH MAKMUR	Konsesi	3	48
ROKAN HILIR	KUBU	TELUK PIYAI	Nonkonsesi	3	12
PELALAWAN	TELUK MERANTI	(blank)	Nonkonsesi	2	2
ROKAN HILIR	PASIR LIMAU KAPAS	PANIPAHAN LAUT	Nonkonsesi	1	6
ROKAN HILIR	PASIR LIMAU KAPAS	SUNGAI DAUN	Nonkonsesi	1	6
KOTA DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	(blank)	Nonkonsesi	1	1
ROKAN HILIR	BATUHAMPAR	(blank)	Nonkonsesi	1	1
SIAK	SUNGAI APIT	(blank)	Konsesi	1	1

⁷ Restorasi hidrologis melalui penimbunan kanal (canal blocking) tidak menjadi fokus mengingat jumlahnya yang masih kecil menurut Rencana Kontijensi 2017 dan RTT Riau 2018.



Peta: wilayah yang menjadi prioritas studi dalam lingkaran hijau dengan tampilan yang diperbesar.

Berdasarkan analisis spasial di atas, area yang menjadi target pengambilan data adalah:

- a. Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- b. Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- c. Desa Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Caveat untuk pemilihan lokasi pengambilan data berdasarkan hasil analisis tersebut adalah bahwa data lokasi infrastruktur berdasarkan Rencana Kontijensi 2017 dan RTT 2018 Riau merupakan data perencanaan. BRG belum memberikan klarifikasi rinci terhadap realisasi dari perencanaan-perencanaan tersebut. Sementara itu di lain pihak, KLHK juga tidak memberikan rincian pasti lokasi realisasi kegiatan restorasi gambut.

Laporan terakhir BRG menyebutkan bahwa restorasi gambut di 7 provinsi prioritas telah mencapai 679.901 hektar selama periode 2016 hingga 2018.⁸ Jumlah ini sekitar 27% dari target restorasi 2,4 juta hektar selama 2016 hingga 2020. Total capaian luasan restorasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 70% pada akhir 2018.⁹ Selain itu, KLHK juga menyebutkan bahwa pemulihan gambut dengan metode pembasahan melalui pembuatan sekat kanal yang dilakukan Kementerian ini telah mencapai 3,1 juta hektar, yang terdiri dari

⁸ <https://brg.go.id/siaran-pers-tiga-tahun-restorasi-gambut/>. Data ini belum termasuk restorasi di dalam wilayah konsesi. Meskipun BRG juga memiliki tugas untuk koordinasi restorasi gambut di wilayah konsesi perusahaan, pelaksanaan koordinasi ini terhambat isu kewenangan, di mana pengawasan area konsesi perusahaan merupakan wewenang dari pemberi izin.

⁹ Berdasarkan Peraturan Presiden No.1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, target capaian areal yang harus diselesaikan per tahun adalah 30% pada 2016, 20% pada 2017, 20% pada 2018, 20% pada 2019, dan 10% pada 2020.



Foto: Lokasi Bekas Kebakaran Desa Lukun Kepulauan Meranti koordinat N 00 53'42,84" E 102 47'41,78"

884.580 hektar pemulihan di areal perkebunan, 2.2 juta hektar di areal Hutan Tanaman Industri (HTI), dan 8.382 hektar di lahan masyarakat selama periode 2015 hingga 2018.¹⁰

Ketidakpastian atas data realisasi dari rencana restorasi dan rincian atas realisasi kegiatan pemulihan gambut membuat penting adanya informasi tambahan yang aktual terkait keberadaan infrastruktur restorasi hidrologis gambut di area yang sedang atau pernah terbakar. Informasi tambahan ini diperoleh dari Simpul Jaringan Pantau Gambut di Riau, yaitu Kaliptra Andalas dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR).

Berdasarkan informasi dari informan di lapangan terkait terjadinya kebakaran gambut di wilayah yang telah mendapat intervensi restorasi, area lain yang menjadi lokasi pengambilan data adalah:

- a. Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai
- b. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- c. Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti
- d. Desa Muara Dua, Kecamatan Siak kecil, Kabupaten Bengkalis
- e. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

¹⁰ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, halaman 113.

PEMBAHASAN

TEMUAN DAN ANALISIS PER LOKASI TIPOLOGI KEBAKARAN GAMBUT DI WILAYAH TERINTERVENSI DI RIAU PERSEPSI MASYARAKAT

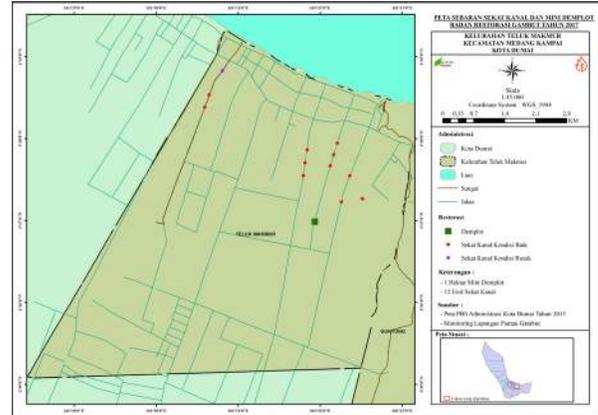
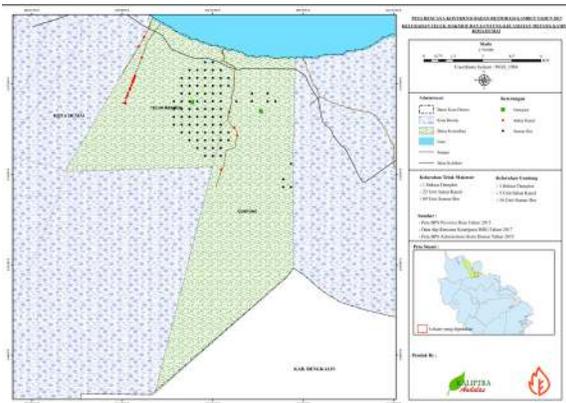


Foto: Lokasi Teluk Makmur koordinat N 01 37'34" E 101 31'48"

Dengan pertimbangan faktor kedekatan lokasi dan untuk data yang lebih variatif, desa di bawah ini ditambahkan ke dalam target pengumpulan data, yakni:

- a. Kelurahan Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- b. Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Dengan demikian, pengambilan data dilakukan di 10 desa yang telah disebutkan di atas. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, studi ini melibatkan tim Simpul Jaringan Pantau Gambut, yakni Kaliptra Andalas, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), dan WRI Indonesia. Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu 24 Maret hingga 6 April 2019.



TEMUAN DAN ANALISIS PER LOKASI

1. KELURAHAN TELUK MAKMUR, KECAMATAN MEDANG KAMPAI, KOTA DUMAI

Kelurahan Teluk Makmur merupakan bagian wilayah administrasi Kota Dumai yang berada dalam area KHG Sungai Rokan – Sungai Siak Kecil. KHG ini merupakan lokasi prioritas kegiatan restorasi gambut di Provinsi Riau pada 2017. Berdasarkan Rencana Kontijensi Restorasi Gambut 2017, kegiatan restorasi di Teluk Makmur antara lain meliputi pembuatan infrastruktur pembasahan berupa 22 sekat kanal dan 69 sumur bor.

Kaliptra Andalas telah memetakan lokasi keberadaan sekat kanal dan petak percontohan. Dari hasil pemetaan, kegiatan restorasi gambut dengan pendekatan pembasahan (rewetting) di Teluk Makmur meliputi pembuatan 12 sekat kanal di wilayah ini.



Foto: Sekat kanal kondisi rusak parah. Sekat kanal kondisi bocor. Koordinat N 01 38'49" dan E 101 30'48"



Foto: Sekat kanal kondisi rusak parah. Sekat kanal kondisi bocor. Koordinat N 01 38'49" dan E 101 30'48"

Berdasarkan hasil observasi langsung, tim menemukan 10 unit sekat kanal yang dibangun pada 2017 oleh BRG, Riau Women Working Group (RWWG), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan polisi. Dari 10 sekat kanal tersebut, 6 unit sudah rusak dan tidak berfungsi lagi untuk membendung air. Tim juga tidak melihat adanya perbedaan antara tinggi muka air di bagian hilir sekat kanal dengan bagian hulunya. Ada tidaknya perbedaan tinggi muka air di hilir dan hulu sekat kanal ini menjadi salah satu tanda berfungsi tidaknya sekat kanal dalam membendung air sehingga dapat membasahi gambut.¹¹

¹¹ Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK No.P.3/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 pasal 10, perbedaan tinggi muka air di hilir dan hulu sekat kanal merupakan salah satu poin dalam pemantauan terhadap infrastruktur pembasahan.



Foto: Kebakaran tepat di samping sekat kanal. Koordinat N 01 37'51" dan E 101 31'50"

Dari catatan tim, jarak antar sekat dalam satu ruas kanal berdekatan, yakni antara 371 meter hingga 620 meter.¹² Meskipun berdekatan, sejumlah sekat kanal yang tidak berfungsi baik di Teluk Makmur ini belum dapat mengurangi risiko kebakaran gambut. Ketika tim melakukan observasi langsung di Teluk Makmur pada 24 hingga 26 Maret 2019, kebakaran gambut sedang terjadi. Bahkan, kebakaran di Teluk Makmur sudah terjadi sejak awal tahun. Tim menemukan kebakaran yang terjadi di Teluk Makmur terdapat persis di samping kanal dan dekat dengan sekat kanal. Jarak dari lokasi titik api ke sekat kanal hanya berkisar 5-10 meter. Di lokasi terbakar ini, sebagian besar vegetasi berupa akasia, paku-pakuan, dan semak belukar.

Kelurahan Teluk Makmur memiliki kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terdiri dari 10 anggota untuk melakukan patroli rutin dan membantu dalam melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran. MPA dengan dibantu aparat desa dan aparat keamanan melakukan operasi pemadaman di darat dengan menggunakan bantuan mesin bermerek Robin. Selain itu, operasi pemadaman via udara dilakukan dengan waterbombing dari helikopter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa serta keterangan dari MPA dan sejumlah warga,

¹² Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK No.P.3/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018, tingkat kecuraman lahan berpengaruh pada jumlah dan jarak sekat kanal yang harus dibangun sebagai infrastruktur pembasahan untuk pemulihan ekosistem gambut. Semakin curam lahan, maka semakin banyak jumlah sekat kanal yang harus dibangun dan jarak antar sekat tidak terlalu jauh. Semakin landai lahan, maka jumlah sekat kanal akan semakin sedikit dan letaknya berjauhan.

kendala dalam operasi pemadaman di Teluk Makmur adalah:

- a. Sulitnya akses jalan menuju ke lokasi kebakaran. Untuk menjangkau lokasi terbakar, jalan harus dibuka dulu menggunakan alat berat (excavator)
- b. Dana operasional terbatas. Tidak ada anggaran dari kelurahan terkait biaya pemadaman kebakaran. Status Teluk Makmur sebagai kelurahan juga mempersulit pengaturan alokasi dana untuk pencegahan maupun pemadaman karhutla.¹³
- c. Pemilik lahan dengan sekat kanal di wilayahnya memanfaatkan sekat kanal yang masih berfungsi secara terbatas dan musiman. Ketika musim kemarau pemilik lahan menutup sekat tersebut sehingga keadaan di daerah yang lebih rendah menjadi kering dan lebih rentan terbakar.
- d. Partisipasi masyarakat kurang dalam hal membantu proses pemadaman api saat terjadi kebakaran. Pemadaman dilakukan oleh perangkat desa, MPA, dan aparat keamanan.

2. DESA TANJUNG LEBAN, KECAMATAN BUKIT BATU, KABUPATEN BENGKALIS

Desa Tanjung Leban di Kecamatan Bukit Batu berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang termasuk dalam KHG Sungai Rokan – Sungai Siak Kecil. Kegiatan restorasi gambut di desa ini sudah dimulai sebelum program restorasi 2 juta hektar lahan gambut dicetuskan.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, tim menemukan infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal yang telah dibangun sejak tahun 2014 oleh ASEAN

¹³ Berdasarkan peraturan yang ada, kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Pengelolaan dana untuk kelurahan masih berada di dalam APBD, sementara wilayah dengan status desa memiliki APBDes. Dalam praktiknya, dana untuk kelurahan dihitung berdasarkan luas wilayah saja, tanpa mempertimbangkan kepadatan penduduk atau tingkat kemiskinan dan faktor-faktor lain yang digunakan untuk penentuan dana desa.



Foto: Infrastruktur pembasahan yang dibangun pada 2014. Koordinat: N 1 38' 32.424" E 101 45' 30.239"

Peatland Forest Project (APFP). dan kondisinya masih berfungsi dengan baik. Tim juga menemukan 3 sekat kanal yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tanjung Leban pada tahun 2014. Menurut informasi dari anggota MPA Tanjung Leban, pembangunan sekat kanal banyak dilakukan akibat kebakaran hebat yang melanda desa ini tahun 2013-2014. Di penghujung tahun 2018, desa ini kembali memperoleh bantuan sekat kanal semi permanen model spillway (dengan pelimpasan air) dari Yayasan Mitra Insani dan World Wildlife Fund (WWF). Setelah karhutla 2015 terjadi, desa ini termasuk dalam prioritas restorasi gambut. Menurut dokumen Rencana Kontijensi

Restorasi Gambut 2017 BRG, kegiatan restorasi di desa ini meliputi pembuatan sekat kanal dan sumur bor. Namun, tim observasi langsung tidak menemui realisasi dari rencana tersebut di Desa Tanjung Leban ini.

Tim melakukan observasi langsung atas 11 sekat kanal yang berhasil ditemui di Tanjung Leban, Bengkalis. Dari total sekat kanal tersebut, 3 unit rusak dan 1 kering. Ketiga sekat kanal yang rusak merupakan program dari KLHK tahun 2016. Menurut anggota MPA Herryanto, kerusakan disebabkan oleh penempatannya di lokasi pembuangan air perusahaan yang memiliki debit air tinggi. MPA tidak dilibatkan saat penentuan titik dan

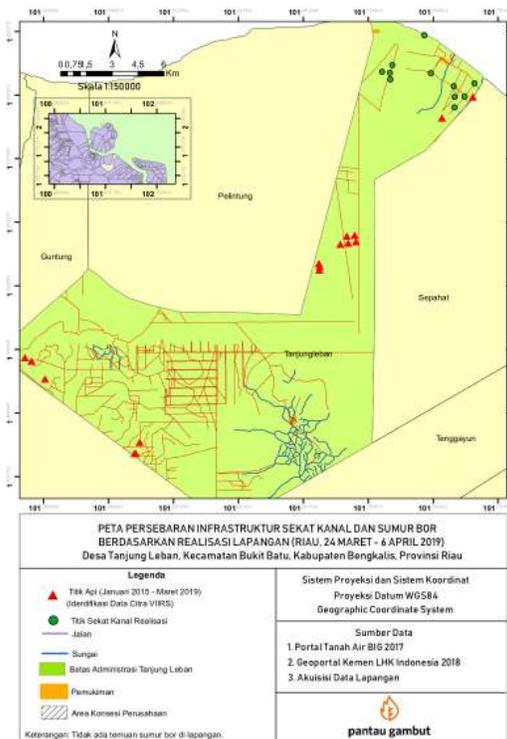
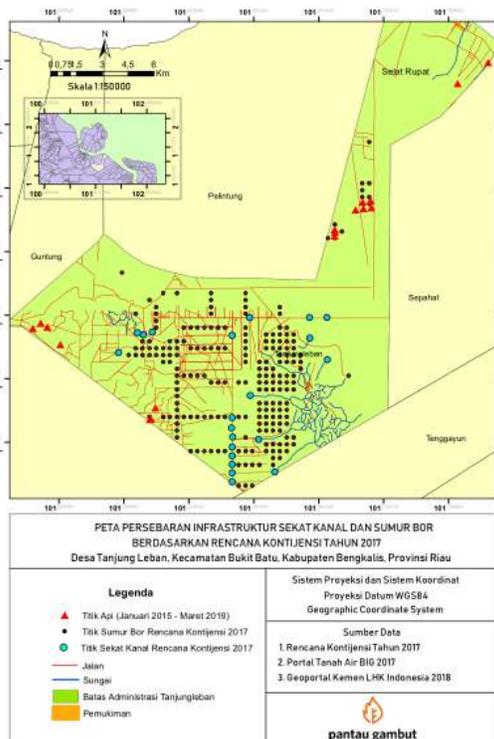




Foto sekat kanal yang rusak dan kering. Koordinat: N 138' 30.077" E 101 44' 11.227" dan N 138' 13.009" E 101 46' 52.161"

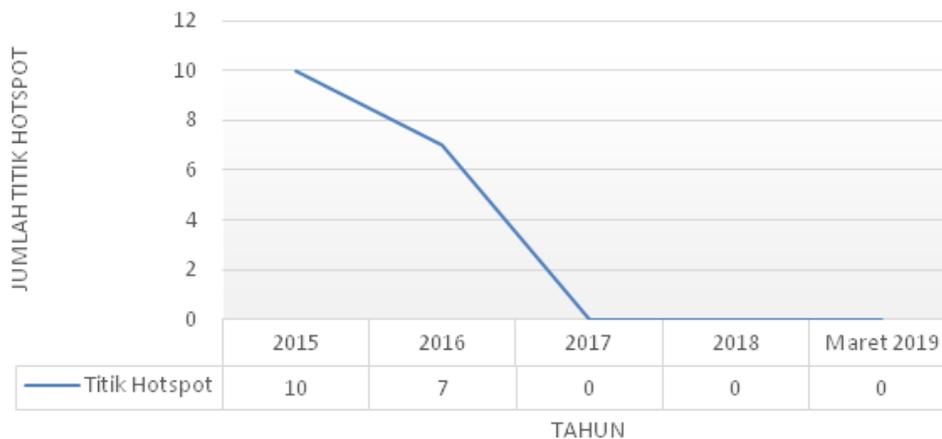
pembangunan sekat kanal tersebut. Sedangkan sekat kanal yang kering adalah milik pemerintah daerah Tanjung Leban yang dibangun tahun 2014.

Desa Tanjung Leban memiliki catatan kejadian karhutla dan mengalami krisis kebakaran parah pada 2014. Menurut informasi sejumlah warga, kebakaran hebat tahun 2014 telah menghancurkan lebih dari 2.000 hektar lahan di Desa Tanjung Leban. Berdasarkan hasil analisis persebaran titik panas

menggunakan citra VIIRS dengan tingkat kepercayaan tinggi, Desa Tanjung Leban mengalami penurunan jumlah kemunculan titik panas yang signifikan pada periode Januari 2015 hingga Maret 2019. Penurunan kemunculan titik panas di Tanjung Leban ini berkorelasi positif dengan upaya restorasi gambut yang dilakukan berbagai pihak.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Tanjung Leban H. Atim dan Pelaksana Tugas Ketua MPA

Persebaran Titik Hotspot Desa Tanjung Leban Januari 2015 - Maret 2019



Grafik jumlah titik panas Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

Tanjung Leban Ismail, faktor tambahan yang menekan karhutla di Desa Tanjung Leban adalah:

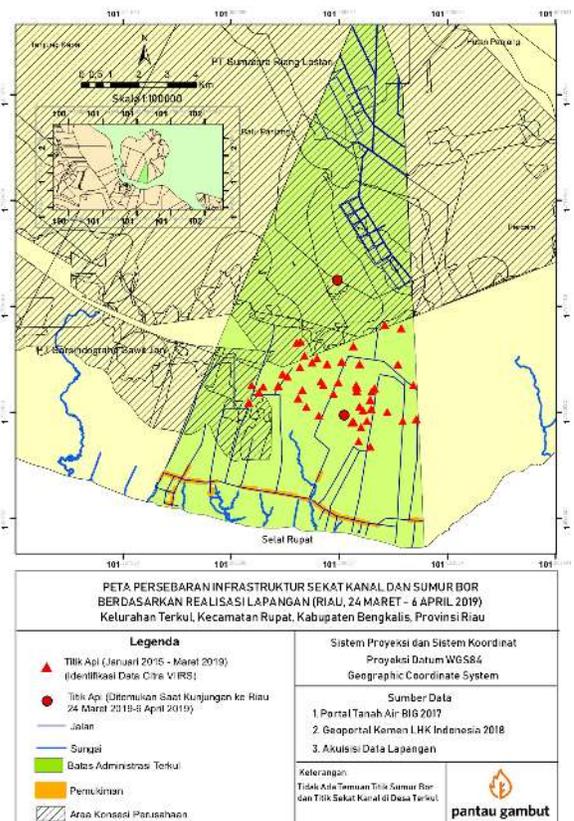
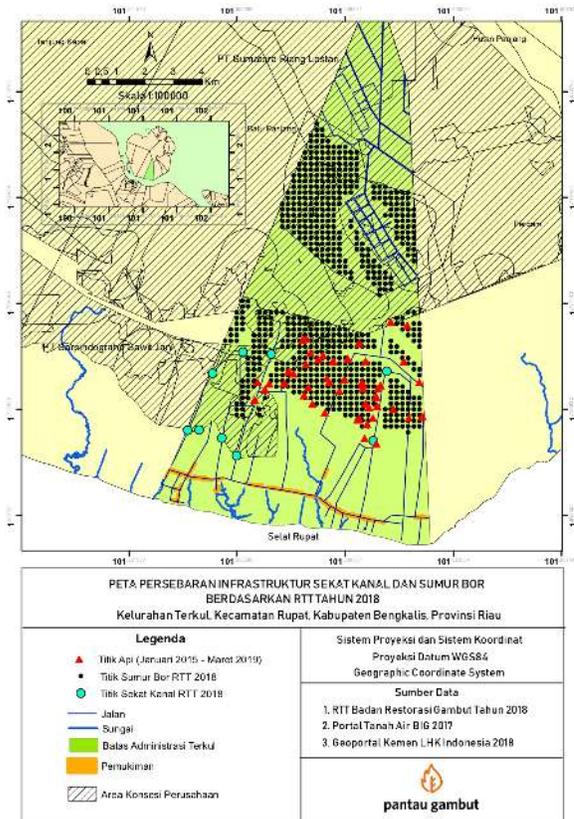
- a. Peran aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui kegiatan rutin pemantauan titik api di lahan sawit milik masyarakat serta tanaman akasia milik perusahaan.
- b. Kerjasama Pemerintah Desa dengan Sinarmas Forestry Group dalam hal pendanaan untuk mencegah karhutla. Pemerintah Desa menganggarkan dana operasional sebesar 3 juta/tahun untuk setiap anggota aktif MPA, atau setara dengan sekitar 80 juta per tahun secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan memberikan tambahan insentif untuk kegiatan patroli MPA sebesar 80 ribu/hari.

3. KELURAHAN TERKUL, KECAMATAN RUPAT, KABUPATEN BENGKALIS

Kelurahan Terkul termasuk ke dalam wilayah KHG Pulau Rupa. Menurut rencana restorasi 2 juta hektar, restorasi lahan gambut dalam KHG Pulau Rupa merupakan rencana prioritas kegiatan untuk tahun 2018. Berdasarkan RTT Restorasi Gambut 2018 Provinsi Riau, rencana kegiatan restorasi hidrologis di Kelurahan Terkul meliputi pembuatan 9 sekat kanal dan 706 sumur bor pada 2018.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan pada 27 - 29 Maret 2019, tim tidak menemukan sekat kanal ataupun sumur bor yang telah dibangun sebagai bagian dari upaya restorasi gambut. Rencana restorasi hidrologis di Kelurahan Terkul untuk 2018 tidak terealisasi. Belum adanya realisasi kegiatan restorasi ini kemungkinan menjadi salah satu faktor penyebab mengapa kebakaran hutan dan lahan, terutama gambut, masih terulang di Kelurahan Terkul.

Menurut keterangan Lurah Terkul, kegiatan pengambilan titik sekat kanal sebagai bagian dari program restorasi gambut pernah dilakukan pada



2018. Namun, kegiatan restorasi hidrologis ini belum terealisasi.

Perlu diperhatikan bahwa menurut analisis spasial atas rencana kegiatan restorasi di Terkul menurut RTT 2018, sebagian besar titik-titik sumur bor dan sejumlah sekat kanal seharusnya akan dibangun di wilayah konsesi perusahaan PT Sumatera Riang Lestari. Dengan demikian, kegiatan restorasi tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan pemegang izin konsesi. Karena keterbatasan akses data konsesi, tim tidak dapat melakukan verifikasi langsung terhadap perkembangan kegiatan restorasi di wilayah perusahaan. Meskipun demikian, menurut keterangan dari aparat desa, kegiatan restorasi gambut di area perusahaan juga belum berjalan. Tim melihat rencana restorasi di Terkul perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama untuk pelaksanaan di area konsesi. Situasi di Terkul dengan sebagian besar rencana pembangunan infrastruktur di area konsesi dapat menyulitkan BRG dalam mengkoordinasi realisasi restorasi gambut di Terkul karena wewenang supervisi untuk area konsesi ada di pemberi izin yang kemungkinan besar adalah KLHK.

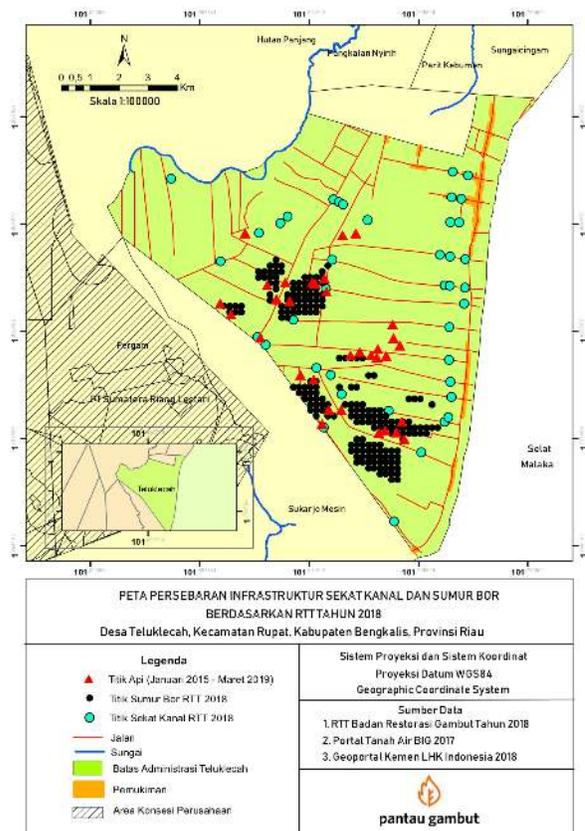
Pada kisaran Februari - Maret 2019, sejumlah wilayah di Terkul kembali terbakar. Tim melakukan pengambilan data pada lokasi bekas terbakar tersebut. Dari keterangan warga, tim mengetahui bahwa wilayah terbakar tersebut merupakan area hak milik individu. Dari observasi langsung, mayoritas tutupan vegetasi di wilayah bekas terbakar tersebut adalah pohon karet. Pengambilan data di dua titik bekas terbakar yang berbeda menunjukkan bahwa tinggi muka air adalah masing-masing 63 cm dan 45 cm.

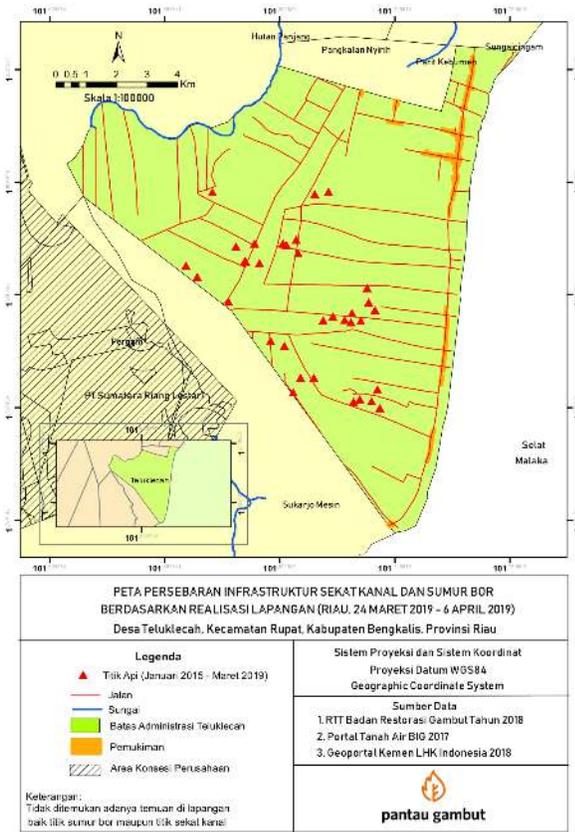
Warga Terkul dan lembaga MPA terlibat aktif dalam pemadaman karhutla pada Februari - Maret 2019, bersama dengan aparat kepolisian dan TNI. Namun, perlu dicatat bahwa Terkul kesulitan mengalokasikan dana untuk operasional kegiatan pemadaman

kebakaran. Status Terkul sebagai kelurahan menjadi salah satu faktor keterbatasan pengalokasian dana.

4. DESA TELUK LECAH, KECAMATAN RUPAT, KABUPATEN BENGKALIS

Desa Teluk Lecah termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Rupert yang berada dalam area KHG Pulau Rupert bersama dengan desa-desa yang lain di dalam Kecamatan Rupert, yaitu Batu Panjang, Darul Aman, Hutan Panjang, Parit Kebumen, Pergam, Sukarjo Mesim, Tanjung Kapal, dan Terkul. Berdasarkan Rencana Tindak Tahunan (RTT), KHG Pulau Rupert merupakan KHG yang menjadi prioritas kegiatan restorasi gambut untuk tahun 2018. Berdasarkan RTT BRG 2018 kegiatan restorasi di desa Teluk Lecah merupakan pembangunan infrastruktur pembasahan berupa pembuatan 40 unit sekat kanal dan 205 unit sumur bor.





Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tim belum menemukan adanya kegiatan restorasi yang terealisasi di Desa Teluk Lecah. Pada awal tahun 2019 telah terjadi kebakaran di Desa Teluk Lecah. Kebakaran tersebut cukup besar yang membakar sebagian besar lahan semak yang ada. Lokasi yang terbakar merupakan lahan masyarakat. Berdasarkan pengamatan pada tanggal 27-28 Maret 2019, tim menemukan sejumlah tanaman kelapa sawit yang baru ditanam pada lokasi lahan bekas terbakar dan tumpukan bibit kelapa sawit siap tanam di sekitar lokasi bekas terbakar. Tim tidak mengambil kesimpulan pasti apakah kebakaran di lokasi pemantauan di Teluk Lecah ini merupakan suatu kesengajaan untuk membuka lahan baru bagi budidaya kelapa sawit. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari para pemangku kepentingan, terutama karena lokasi terbakar yang akan dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit ini merupakan area gambut dalam. Budidaya kelapa

sawit dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat, namun pemanfaatan lahan gambut harus mempertimbangkan keberlanjutan keseluruhan ekosistem.

Tim melakukan pengukuran kedalaman gambut di sejumlah titik dekat dengan lokasi lahan terbakar. Kedalaman gambut pada lahan yang terbakar bervariasi, dari data yang diambil di lapangan terdapat gambut dengan kedalaman 2,1 m - 6,33 m.

NO.	KOORDINAT	KEDALAMAN GAMBUT
1	N 01° 52'03,20" E 101° 43'08,84"	3 meter
2	N 01° 51'58,05" E 101° 43'08,34"	2,1 meter
3	N 01° 51'59,21" E 101° 42'59,48"	5 meter
4	N 01° 51'48,48" E 101° 42'47,43"	6,33 meter



Foto: Bibit sawit sudah ditanam di daerah bekas terbakar, ditemukan di koordinat N 01 52'03,20" dan E 101 43'08,84"



Foto: Bibit sawit siap tanam di sekitar lokasi bekas terbakar, ditemukan di koordinat N 01 52'03,88" dan E 101 43'14,97"



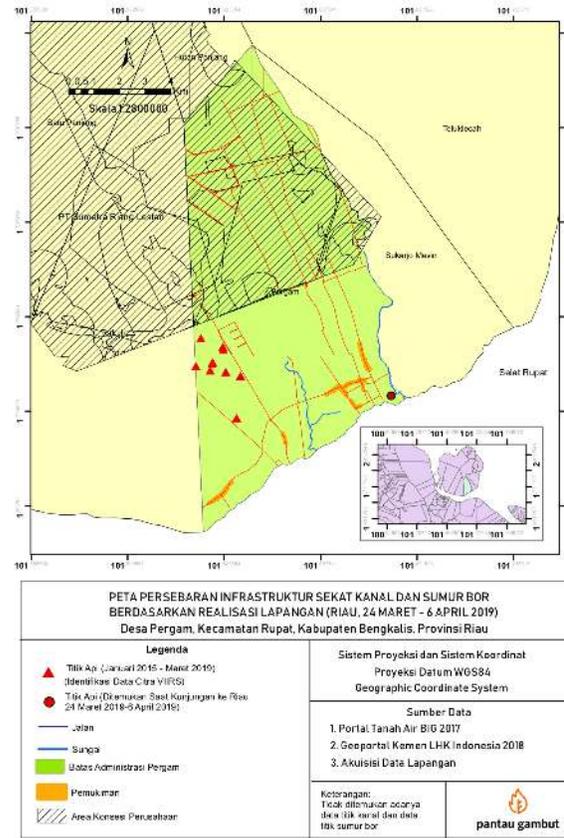
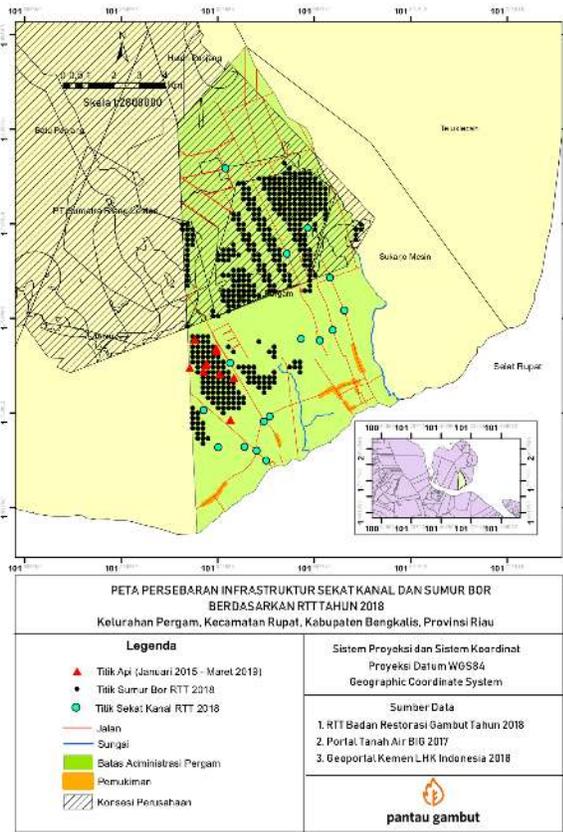
Foto: Sekat bakar di Teluk Lecah. Koordinat N 01 51'49,27" dan E 101 43'08,56"

Teluk Lecah memiliki MPA yang terdiri dari 10 anggota untuk melakukan patroli rutin dan membantu dalam melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Salah satu cara pemadaman kebakaran di Teluk Lecah pada kebakaran Januari hingga Maret 2019 ini dilakukan dengan membuat sejumlah sekat bakar dengan tujuan api tidak menyebar ke wilayah yang tidak terbakar. MPA dengan dibantu aparat desa dan aparat keamanan melakukan operasi pemadaman di darat dengan menggunakan bantuan mesin bermerek Robin dan alat berat (excavator). Selain itu, operasi pemadaman via udara dilakukan dengan waterbombing dari helikopter. Menurut keterangan Kepala Desa, seluruh pengeluaran upaya pemadaman kebakaran di Teluk Lecah menggunakan dana operasional desa yang terbatas.

5. KELURAHAN PERGAM, KECAMATAN RUPAT, KABUPATEN BENGKALIS

Pergam merupakan Kelurahan di Kecamatan Rupert yang masuk dalam KHG Pulau Rupert, bersama dengan desa-desa lain yaitu Batu Panjang, Darul Aman, Hutan Panjang, Parit Kebumen, Teluk Lecah, Sukarjo Mesim, Tanjung Kapal, dan Terkul. Berdasarkan data Rencana Tindak Tahunan (RTT) BRG tahun 2018, wilayah ini dijadikan prioritas kegiatan restorasi gambut dengan jumlah Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) sebanyak 16 sekat kanal dan 448 sumur bor. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, tim belum menemukan kegiatan restorasi ekosistem gambut berupa sekat kanal atau sumur bor. Belum adanya realisasi dari rencana kegiatan restorasi ini kemungkinan besar menjadi salah satu faktor berulangnya karhutla.

Menurut informasi dari Kelurahan, BRG telah sempat mengirimkan petugas dan meminta sejumlah perwakilan kelurahan untuk melakukan verifikasi atas koordinat titik sekat kanal pada 2018. Namun, belum ada tindak lanjut atas hasil penitikan tersebut.



Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap data RTT 2018 dan data sebaran titik api Januari 2015 - Maret 2019 dapat dilihat bahwa hampir semua titik panas berada dan atau berdekatan dengan rencana pembangunan sekat kanal ataupun sumur bor. Jika implementasi rencana restorasi tepat waktu, maka seharusnya dapat mengurangi dan mempermudah upaya pemadaman saat karhutla pada Februari 2019 di Pergam.

Melihat dari peta persebaran infrastruktur sekat kanal dan sumur bor tersebut, akan banyak pembuatan infrastruktur sekat kanal dan sumur bor di area konresi PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan BRG dalam mengkoordinasi pembangunan infrastruktur restorasi gambut di Pergam, karena wewenang supervisi untuk area konresi tersebut ada di pemberi izin yang kemungkinan besar



Foto: Lokasi kebakaran Kelurahan Pergam. Koordinat N 1 44' 35.552" E 101 41' 31.081"

adalah KLHK. Pengawasan atas pelaksanaan restorasi oleh perusahaan harus dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran, terutama di lahan gambut, yang ada di Pergam.

Tim melakukan observasi ke salah satu lokasi bekas kebakaran yang baru saja padam pada pertengahan Maret 2019 silam. Dari hasil pantauan, tutupan lahan hak milik individu yang terbakar berupa sawit berusia 3 tahun, semak belukar dan akasia yang tumbuh secara alami. Tidak jauh dari lokasi kebakaran terdapat kanal yang terdapat air yang berasal dari hujan yang terjadi dua hari sebelum tim mengunjungi lokasi pada tanggal 28 Maret 2019. Tinggi Muka Air di kanal tersebut adalah 38 cm.



Foto: Kanal dekat lokasi Kebakaran. Koordinat N 1 44' 35.552" E 101 41' 31.081"

Upaya penanggulangan Karhutla yang terjadi di Pergam melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat dan berbagai pihak dengan menggunakan mesin air hingga helikopter waterbombing. Meskipun bantuan operasional pemadaman telah datang dari pusat dan berbagai pihak, pihak kelurahan dan kecamatan tetap harus mengeluarkan biaya untuk mendukung operasional dengan kondisi anggaran yang terbatas. Perlu dicatat juga bahwa tidak ada alokasi anggaran yang diberikan untuk kegiatan operasional MPA Pergam, sehingga tidak ada kegiatan rutin pemantauan dan pencegahan karhutla. MPA yang berjumlah 10 orang ini hanya mampu menyumbang tenaga saat kebakaran terjadi.

6. DESA MUARA DUA, KECAMATAN SIAK KECIL, KABUPATEN BENGKALIS

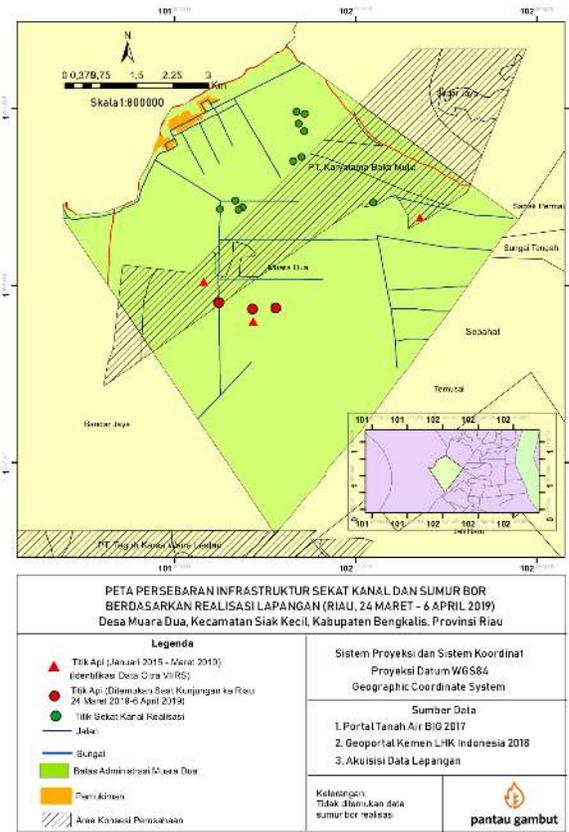
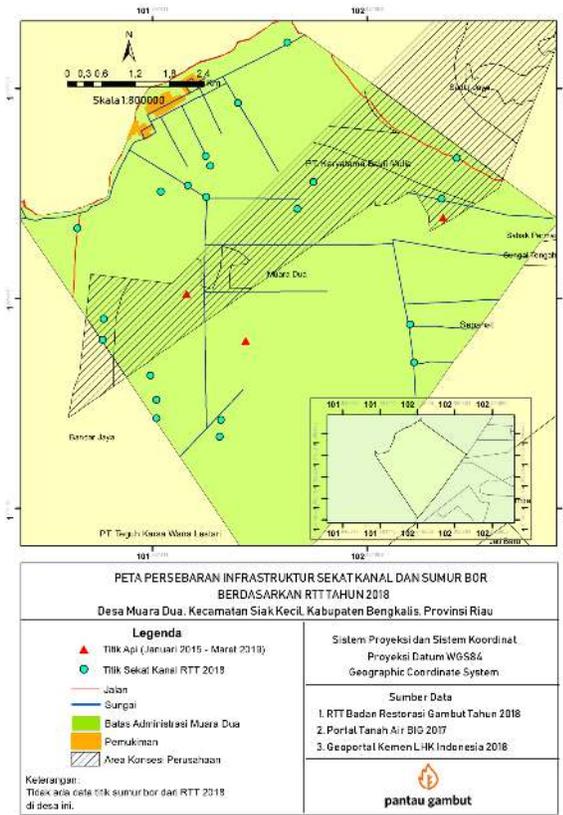
Desa Muara Dua merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Siak Kecil yang berada di dalam area KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak. Desa Muara Dua termasuk ke dalam wilayah rencana restorasi 2 juta hektar lahan dari BRG. Berdasarkan RTT BRG 2018, kegiatan restorasi di Desa Muara Dua merupakan pembangunan infrastruktur pembasahan berupa pembuatan sekat kanal sebanyak 21 unit.

Berdasarkan hasil observasi langsung ke lapangan pada tanggal 4-5 April 2019, tim mengunjungi 3 unit sekat kanal yang dibangun pada tahun 2018 oleh pihak BRG yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (PIPG) melalui Tugas Pembantuan. PIPG di Muara Dua pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Bersama Bengkalis dan Pokmas Jati Mulyo. Tiga sekat kanal yang dikunjungi berada di wilayah perkebunan kelapa sawit masyarakat. Kondisi sekat kanal masih bagus dan berfungsi dengan baik. Jarak antar sekat kanal berkisar 1-1,3 km. Pada semua sekat terlihat air terbendung dan mengalir sedikit dikarenakan debit air yang kecil.



Foto: Sekat kanal dengan kondisi baik di Muara Dua. Koordinat N 01 05'42,45" dan E 102 01'14,34"

Karena keterbatasan waktu dan lokasi yang jauh, tim tidak dapat mengunjungi lokasi sekat kanal lainnya. Tim mendapat koordinat 8 sekat kanal lain yang dibangun Pokmas Maju Bersama namun tidak



mendapat koordinat 10 sekat kanal yang dibangun Pokmas Jati Mulyo. Peta realisasi yang ada pada halaman sebelumnya belum termasuk lokasi sekat-sekat kanal yang dibangun Pokmas Jati Mulyo.

Pada sekitar Februari - Maret 2019, terjadi karhutla di Desa Muara Dua di lokasi yang cukup jauh dari sekat kanal, yaitu sekitar 2 km. Menurut keterangan dari ketua MPA setempat yaitu Riono menyebutkan bahwa titik api pertama terlihat pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 15.30 WIB dan telah membakar lahan kurang lebih seluas 900 m². Upaya pemadaman kebakaran dilakukan bersama-sama antara warga, MPA, perangkat desa, dan aparat keamanan. Kendala ketika memadamkan api adalah tidak adanya sekat kanal yang berada di wilayah tersebut, sehingga tidak tersedianya sumber air yang cukup untuk memadamkan kebakaran. Selain itu pada lokasi bekas terbakar, tim menemukan lubang-lubang di lahan

bekas terbakar beserta alat pelubangnya (Tugal: Bahasa daerah setempat). Lahan terbakar merupakan milik individu yang di sekitarnya merupakan perkebunan sawit. Melihat vegetasi yang ada, lubang baru di lahan bekas terbakar kemungkinan besar juga dipersiapkan untuk tanaman baru sawit.



Foto: Alat pembuat lubang tanah untuk penanaman bibit sawit

Hal ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari para pemangku kepentingan, terutama karena lokasi terbakar yang akan dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit ini merupakan area gambut dalam. Budidaya kelapa sawit dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat, namun pemanfaatan lahan gambut harus mempertimbangkan keberlanjutan keseluruhan ekosistem. Tim mengukur kedalaman gambut di lokasi terbakar. Dari dua titik pengukuran yang diambil, kedalaman gambut di area tersebut lebih dari 7 meter. Di lokasi bekas terbakar juga terdapat papan pemberitahuan bahwa lokasi tersebut sedang dalam penyelidikan polisi. Namun, belum ada kelanjutan dari penyelidikan dimaksud.



Foto: Papan penyelidikan karhutla oleh pihak kepolisian



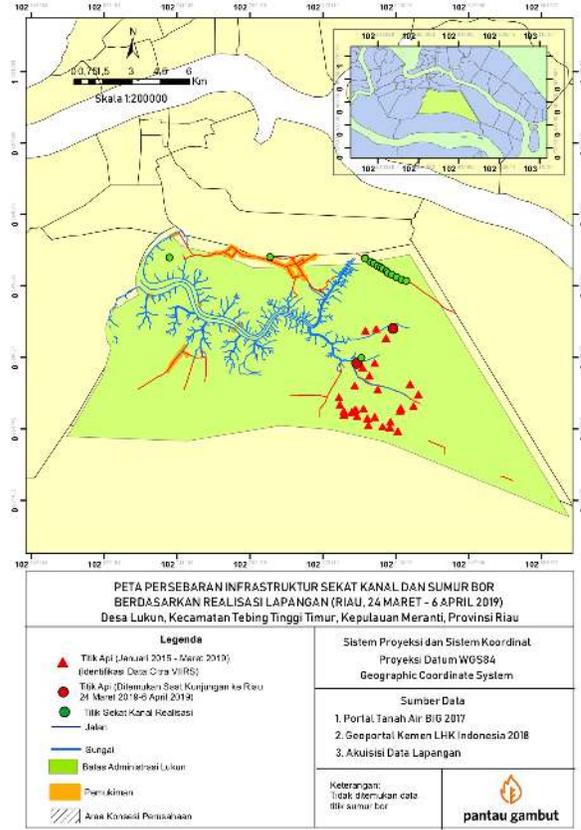
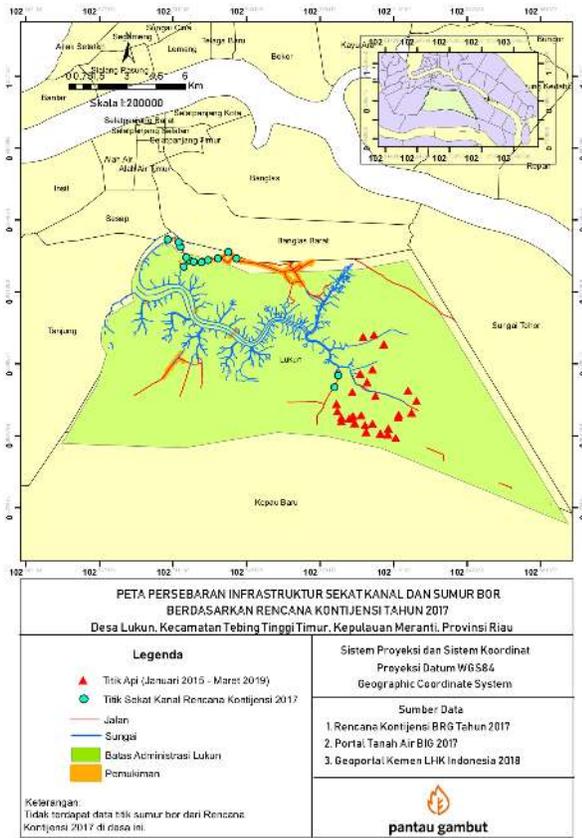
Foto: Lokasi kebakaran Muara Dua. Koordinat N 01 03'37,20" dan E 102 00'59,04"

Program restorasi hutan gambut di Muara Dua terealisasi dengan baik. Namun, penempatan lokasi sekat kanal harus diperhitungkan sehingga dapat memberi dampak pembasahan yang diinginkan hingga ke wilayah yang rawan kebakaran. Pada peta PIPG RTT 2018 (lihat peta), terlihat satu titik panas dekat dengan sekat kanal. Dalam kenyataannya, titik panas tersebut berjarak sekitar 2,9km dari sekat kanal. Penempatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut harus benar-benar diperhitungkan di lokasi yang memang rawan terbakar sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi pembasahan lahan yang kering dan mengurangi tingkat karhutla yang terjadi.

7. DESA LUKUN, KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Desa Lukun termasuk dalam KHG Pulau Tebing Tinggi yang menjadi sasaran kegiatan restorasi gambut pada 2017. Berdasarkan Rencana Kontijensi 2017, kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan di Desa Lukun meliputi pembuatan 14 sekat kanal. Dari observasi tim yang mengunjungi wilayah Lukun pada 1-3 April 2019, terdapat 17 sekat kanal yang dibangun pada 2017 dan 2018. Kegiatan di Lukun pada 2017 merupakan bagian dari program pengembangan model sistem tata air terintegrasi untuk pembasahan gambut yang terdiri dari infrastruktur sekat kanal, pemantauan muka air tanah, dan patok subsiden. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Pusat Studi Bencana (PSB) LPPM Universitas Riau dan BRG. Sedangkan untuk 2018, kegiatan pembangunan sekat kanal merupakan bagian dari kegiatan PIPG melalui Tugas Pembantuan.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, PPIG di

¹⁴ Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan tugas pembantuan terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Laporan Pantau Gambut terkait pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat diperoleh di <http://www.pantaugambut.id/publikasi/menelisik-tugas-pembantuan-restorasi-gambut-2018>



Lukun pada 2018 dibuat oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Damai. Dari total 17 sekat kanal yang ditemukan tim, 16 di antaranya berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk. Sekat-sekat kanal ini masih dalam kondisi baik. Di beberapa sekat



Foto: Sekat kanal bagian dari program pengembangan sistem model tata air terintegrasi kerjasama LPPM Universitas Riau dengan BRG. Koordinat N 00 56,547' dan E 102 48,082'



Foto: Sekat kanal PIPG Tugas Pembantuan 2018. Koordinat N 00 56,547' dan E 102 48,166'

terlihat bahwa air kanal sedikit terbandung di bagian kanan-kiri namun tidak mengalir karena debit air yang rendah. Sementara itu, 1 sekat kanal lain berada jauh dari lokasi pemukiman. Untuk mencapai lokasi sekat ini harus menggunakan perahu kecil selama kurang lebih 30 menit. Saat tim melakukan observasi



Foto: Kondisi sekat kanal di dekat lokasi terbakar di Lukun. Koordinat lokasi sekat kanal (sesuai keterangan pada papan penanda PIPG): N 00 53,730' E 102 47,715' (N 00 53' 43,86" E 102 47' 42,94")



Foto: Lahan bekas terbakar di dekat sekat kanal. Tim melakukan pengukuran kedalaman gambut di lokasi kebakaran ini. Di satu titik yang diambil, kedalaman gambut adalah 2 meter.

langsung ke sekat kanal ini, lokasi sekitar merupakan area yang baru saja padam dari kebakaran lahan. Sekat kanal ini dalam kondisi yang sudah rusak dan tidak dapat menahan air yang mengalir ke arah sungai. Lahan bekas terbakar sebelumnya memiliki vegetasi berupa belukar, sagu, dan karet. Dari keterangan warga, lahan bekas terbakar ini sebagian merupakan lahan individu dan sebagian hutan desa. Upaya pemadaman kebakaran selama awal 2019 dilakukan bersama-sama antara warga, aparat pemerintah desa, MPA, aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Kendala utama dari upaya pemadaman kebakaran ini adalah lokasi terbakar yang sulit dijangkau.

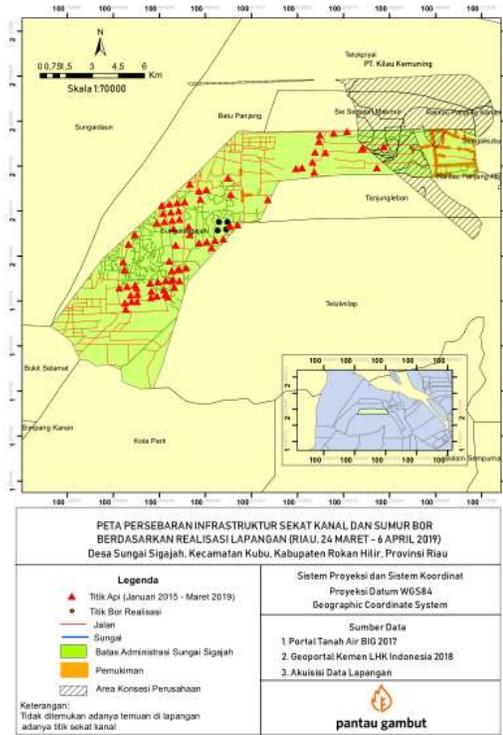
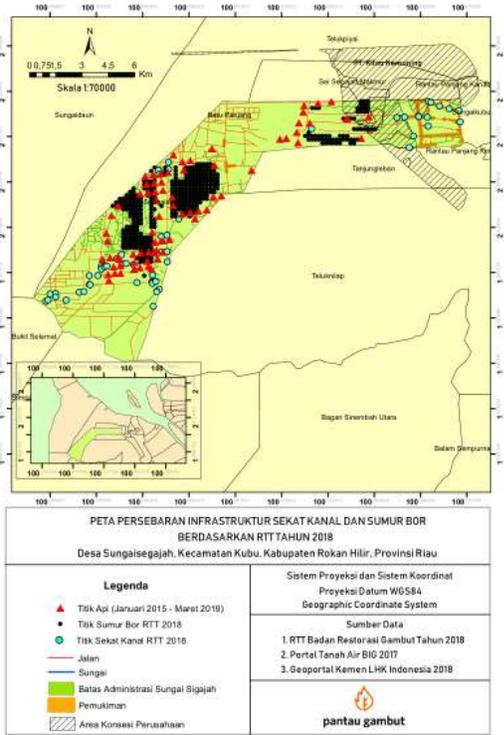
Realisasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut di Lukun terlihat terlaksana dengan baik. Namun, upaya pembasahan juga sangat perlu dilakukan di wilayah yang memang rawan kebakaran, bukan hanya sebagai percontohan di wilayah dekat pemukiman yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

8. DESA SEI SIGAJAH (SUNGAI SIGAJAH/ SEGAJAH), KECAMATAN KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR

Desa Sungai Sigajah berada di wilayah KHG Sungai Barumon - Sungai Kubu yang menjadi sasaran kegiatan rencana restorasi gambut di Riau pada 2018. Berdasarkan RTT BRG 2018, kegiatan restorasi gambut melalui pembangunan infrastruktur pembasahan meliputi pembuatan 64 sekat kanal dan 382 sumur bor.

Dari observasi langsung pada 1-3 April 2019, tim memverifikasi keberadaan 8 sekat kanal di desa ini. Dari total 8 sekat kanal tersebut, 7 dibangun pada 2018 oleh BRG melalui skema tugas pembantuan dan 1 dibangun atas inisiatif warga sendiri. Pokmas Maju Bersama menjadi pelaksana di tingkat tapak untuk pembangunan infrastruktur sekat kanal di Sungai Sigajah ini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Desember 2018. Dari semua sekat kanal, hanya satu sekat kanal yang berfungsi namun mengalami kebocoran di bagian tengah sehingga tidak dapat mengatur aliran air sesuai yang diharapkan.

Pada peta realisasi berdasarkan pemantauan lapangan, terlihat ada titik sumur bor di wilayah ini. Titik tersebut merupakan koordinat yang diperoleh tim Pantau Gambut dari Pokmas di Desa Tanjung Leban, yang berbatasan langsung dengan Sungai Sigajah. Setelah melakukan tumpang susun, koordinat-koordinat tersebut ternyata berada administrasi Sungai Sigajah sehingga muncul dalam peta ini.



DESA	PEMBAUT SEKAT KANAL	TAHUN	LATITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
Sungai Sigajah	BRG	2018	2.051695	100.577036	TMA= 98cm, air mengalir, lebar sekat 4m
Sungai Sigajah	BRG (Pokmas Maju Bersama)	2018	2.052422	100.571532	TMA= 60cm, air mengalir, lebar sekat 4m
Sungai Sigajah	BRG (Pokmas Maju Bersama)	2018	2.052532	100.565717	TMA= 80cm, air mengalir, lebar sekat 4m
Sungai Sigajah	BRG (Pokmas Maju Bersama)	2018	2.050033	100.575632	TMA= 70cm, air mengalir tapi tidak deras, lebar sekat 4m
Sungai Segajah	BRG (Pokmas Maju Bersama)	2018	2.033781	100.578142	TMA= 90cm, air mengalir tidak deras, lebar sekat 4m
Sungai Sigajah	BRG (Pokmas Maju Bersama)	2018	2.025292	100.554641	TMA= 35cm, air mengalir lancar
Sungai Sigajah	BRG (Pokmas Maju Bersama)	2018	2.027154	100.550539	TMA= 30cm, air mengalir deras
Sungai Sigajah	Warga	2016	2.047577	100.574357	TMA= 20cm, air mengalir deras lewat paralon, lebar sekat 3m

Pada saat observasi langsung dilakukan, tim tidak menemukan adanya kebakaran di wilayah ini. Menurut keterangan warga dan berdasarkan analisis spasial titik panas, kebakaran terakhir terjadi pada sekitar Juli - Agustus 2018, sebelum sekat kanal ini dibuat. Dengan demikian, kemungkinan ada korelasi positif antara pembangunan sekat kanal dengan peningkatan kondisi gambut yang basah sehingga berdampak pada penurunan kemunculan titik panas atau titik api di wilayah ini.



Foto: Sekat kanal yang masih berfungsi di Sungai Sigajah. Koordinat N 02 2' 1.612" E 100 34' 41.311"

Selain melakukan observasi langsung, tim juga melakukan pengukuran terhadap tinggi muka air di sekat kanal. Dari 8 titik yang diambil, tinggi muka air dalam rentang 20 hingga 98 cm. Batas tinggi muka air yang dianggap aman adalah 40 cm.¹⁵

Secara umum, periode rawan kebakaran di Riau adalah Januari hingga Maret dan Juli hingga Agustus. Pengamatan lebih lanjut diperlukan di Sungai Sigajah untuk melihat korelasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut dengan penurunan kebakaran, terutama saat musim kemarau pada Juli - Agustus tahun ini.



¹⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, ekosistem gambut dengan fungsi budidaya mengalami kerusakan salah satunya apabila muka air tanah lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut.

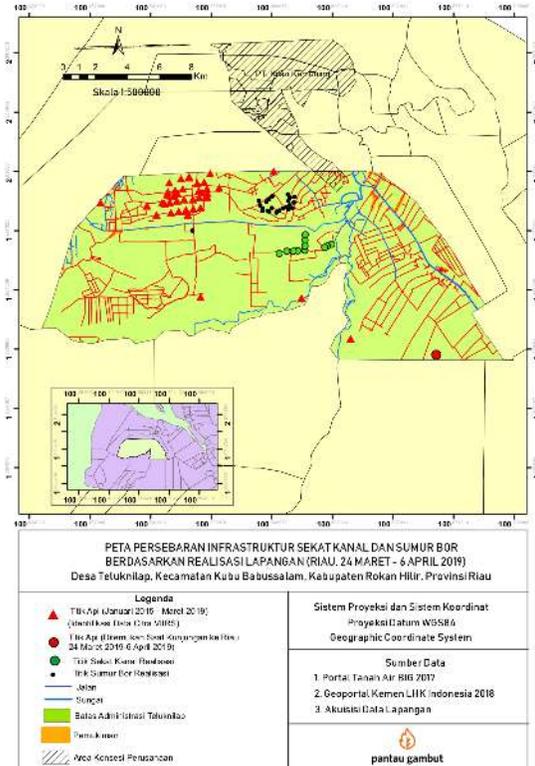
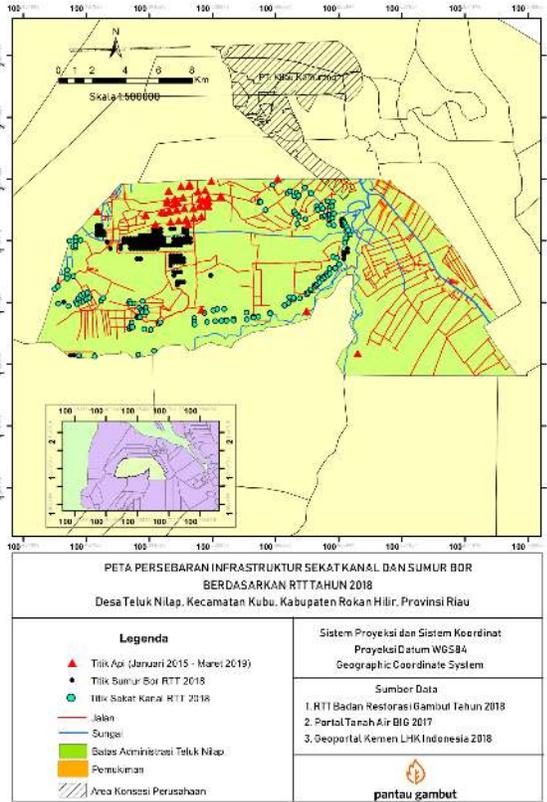


Foto: Sekat kanal yang tidak berfungsi seperti diharapkan karena air mengalir di bagian tengah. Koordinat N 02 1'31.051" E 100 33' 16.707"

9. DESA TELUK NILAP, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR

Desa teluk Nilap yang masuk dalam KHG Sungai Barumun-Sungai Kubu adalah salah satu wilayah yang masuk dalam rencana kegiatan restorasi tahun 2018. Berdasarkan Rencana Tindak Tahunan (RTT) tahun 2018, kegiatan restorasi di wilayah ini meliputi pembangunan 175 sekat kanal dan 131 sumur bor. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa Teluk Nilap, pembangunan 144 sekat kanal telah dilakukan oleh BRG pada penghujung tahun 2018. Karena keterbatasan waktu dan lokasi yang jauh, tim mengunjungi 11 sekat kanal. Dari total yang dikunjungi tersebut terdapat 6 sekat kanal yang tidak berfungsi untuk membendung air. Tim melihat sekeliling sekat kanal yang dipenuhi dengan semak belukar dan tidak ada perbedaan antara tinggi permukaan air di sisi kiri dengan sisi kanan sekat.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekat kanal yang dijumpai terletak di dekat pemukiman warga dan dimanfaatkan warga untuk beraktivitas seperti mencuci hingga budidaya ikan. Tim melakukan observasi langsung pada lokasi sekat kanal terdekat yang dibangun BRG pada Desember 2018 di Dusun Suak Sotul. Hasil penarikan



garis lurus GPS menunjukkan bahwa jarak antara titik kebakaran dengan sekat kanal terdekat yaitu 11,5 Km. Lokasi sekat kanal yang jauh ini menjadi salah satu penyebab lahan menjadi kering sehingga mudah terbakar. Berdasarkan informasi dari Kepala Urusan Pembangunan Kepenghuluan Teluk Nilap Azniral, belum ada infrastruktur pembasahan di dekat lokasi kebakaran dan pembangunan sekat kanal pada bulan Desember 2018 mengacu pada lokasi kebakaran yang terjadi tahun 2018 silam.

Namun, berdasarkan hasil analisis spasial terhadap data persebaran titik api periode Januari 2015 - Maret 2019 dan RTT 2018, dapat dilihat bahwa sebagian besar sumur bor dan sekat kanal berada cukup jauh dari sejarah persebaran titik panas. Penentuan lokasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut perlu mempertimbangkan lokasi dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.

Hasil observasi tim di lapangan pada tanggal 4-5 April 2019 menemukan kabut asap tipis dan bara api di lahan yang baru saja terbakar pada minggu terakhir Maret 2019. Di lokasi kebakaran yang terletak 5 km dari Jalan Dumai-Kubu KM 41, tim



Foto: Lokasi kebakaran di Desa Teluk Nilap. Koordinat N: 1 54°40.47" E: 100 39' 53.676"

tidak menemukan infrastruktur pembasahan gambut terdekat. Berdasarkan keterangan warga sekitar, kebakaran mulai terdeteksi dari bulan Februari 2019 dan menghanguskan 3 hektar lahan individu dengan dominasi sebelum terbakar berupa semak belukar dan akasia. Hasil pengukuran tinggi muka air di kanal yang ada persis di dekat lokasi kebakaran adalah 60 cm.

Tim juga menemukan sekat kanal yang jaraknya sangat dekat dengan saluran drainase/gorong-gorong. Jika melihat dari fungsi utama gorong-gorong untuk mengurai debit air, seharusnya pembangunan sekat kanal dilakukan di lokasi lain yang tidak berdekatan dengan saluran drainase air sehingga dapat lebih efisien dalam pemanfaatannya.



Foto: Sekat kanal yang penuh semak dan air yang tidak mengalir. Koordinat N: 1 59'9.712" E: 100 35' 18.733"



Foto: Sekat kanal dekat gorong-gorong. Koordinat N: 1 59'9.712" E: 100 35' 18.733"

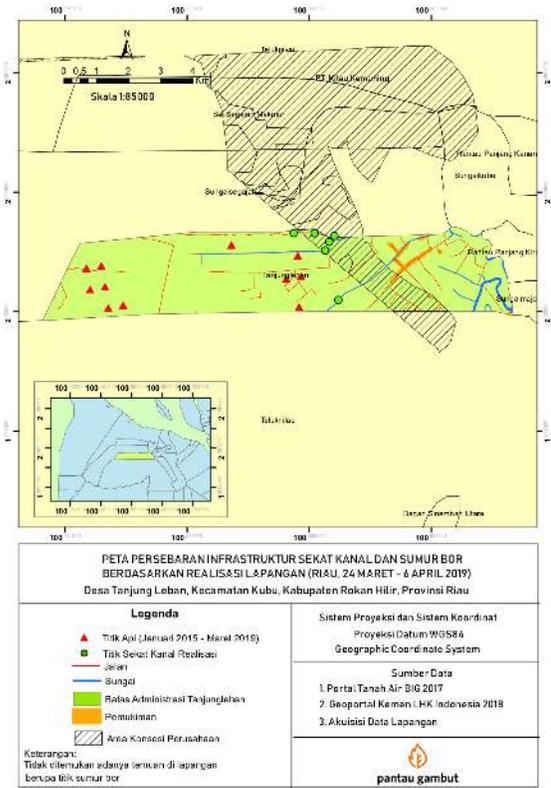
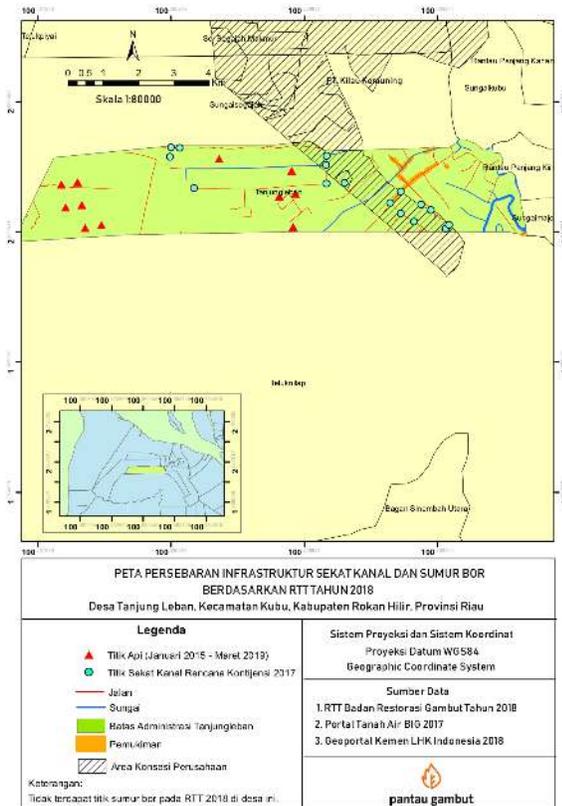
Operasi pemadaman api yang dilakukan oleh aparat desa, polisi, MPA dan TNI terhambat sulitnya memperoleh sumber air terdekat sehingga membuat selang air pemadam sulit menjangkau lokasi, lokasi kebakaran jauh dari jalan utama, dan kondisi jalan tanah yang sempit sulit dilalui kendaraan.

10. DESA TANJUNG LEBAN, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR

Desa Tanjung Leban di Rokan Hilir berada di wilayah KHG Sungai Barumun – Sungai Kubu yang menjadi sasaran kegiatan rencana restorasi gambut di Riau pada 2018. Berdasarkan RTT BRG 2018, kegiatan restorasi gambut melalui pembangunan infrastruktur pembasahan di desa ini meliputi pembuatan 16 sekat kanal.

Tim melakukan verifikasi atas 6 sekat kanal dan 10 sumur bor di desa ini. Keseluruhan sumur bor dibangun pada 2018 melalui skema tugas pembantuan. Namun, pada saat melakukan tumpang susun titik sumur bor dan titik panas dengan batas administrasi Desa Tanjung Leban, tim menemukan bahwa koordinat-koordinat sumur bor tersebut berada dalam wilayah administrasi Desa Teluk Nilap yang memang berbatasan langsung dengan Tanjung Leban. Oleh karena itu, detail mengenai lokasi sumur bor dapat dilihat dalam peta Teluk Nilap di halaman-halaman sebelumnya.

Untuk sekat kanal, pembangunan 5 dari 6 sekat kanal dilakukan pada 2018 melalui skema tugas pembantuan sedangkan 1 sekat kanal lainnya dibangun atas inisiatif pemerintah desa pada 2015. Dari 5 sekat kanal yang dibangun pada 2018, 3 di antaranya tidak berfungsi karena mengalami kebocoran sehingga tidak dapat mengatur aliran air. Sementara itu, semua sumur bor dapat digunakan dan tidak tersumbat.



Pada saat observasi langsung dilakukan, tim tidak menemukan adanya kebakaran di wilayah ini. Menurut keterangan warga dan berdasarkan analisis spasial titik panas, kebakaran terakhir terjadi pada sekitar Juli – Agustus 2018, sebelum 5 sekat kanal dan 10 sumur bor dibuat di desa ini. Dengan demikian, kemungkinan ada korelasi positif antara pembangunan sekat kanal dengan peningkatan kondisi gambut yang basah sehingga berdampak pada penurunan kemunculan titik panas atau titik api di wilayah ini.

Selain melakukan observasi langsung, tim juga melakukan pengukuran terhadap tinggi muka air di sekat kanal. Dari 8 titik yang diambil, tinggi muka air dalam rentang 25 hingga 60 cm.

DESA	PEMBAUT	TAHUN	LATITUDE	LONGITUDE	KONDISI
Tanjung Leban	BRG & Pokmas	2018	2.019034	100.541142	TMA= 30cm, lebar sekat 3m, air mengalir
Tanjung Leban	BRG & Pokmas	2018	2.009098	100.545973	TMA= 42cm, lebar sekat 3,5m, air mengalir lancar
Tanjung Leban	BRG & Pokmas	2018	2.006193	100.545872	TMA= 25cm, air mengalir lewat bawah
Tanjung Leban	BRG	2018	2.020000	100.481274	TMA= 35cm, air mengalir
Tanjung Leban	Pemerintah desa	2015	2.02385	100.57759	TMA= 60cm, lebar sekat 4m, air mengalir
Tanjung Leban	BRG	2018	2.0125	100.56283	TMA= 30cm, lebar sekat 4m, air mengalir

Pengamatan lebih lanjut diperlukan di Sungai Sigajah untuk melihat korelasi pembangunan infrastruktur sekat kanal pembasahan gambut dengan penurunan kebakaran, terutama saat musim kemarau pada Juli – Agustus

tahun ini. Selain itu, pengamatan juga diperlukan untuk kembali melihat apakah sumur bor dapat berfungsi pada periode ini.

TIPOLOGI KEBAKARAN GAMBUT DI WILAYAH TERINTERVENSI RESTORASI DI RIAU

Berdasarkan temuan dan analisis atas data-data observasi langsung, 10 desa di Riau lokasi pengambilan data dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu wilayah restorasi masih terjadi karhutla gambut, wilayah restorasi tidak terjadi karhutla gambut, wilayah restorasi masih terjadi karhutla di lokasi terjauh, dan wilayah tidak/belum restorasi terjadi karhutla gambut. Berikut adalah penjelasan untuk tiap-tiap kategori.

1. TERINTERVENSI RESTORASI DAN KARHUTLA GAMBUT

Wilayah yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Program restorasi gambut melalui pembangunan infrastruktur pembasahan di Teluk Makmur telah berjalan pada 2017. Namun, dampak pembasahan gambut yang diharapkan dari infrastruktur tersebut belum terlihat karena kebakaran gambut masih terjadi di dekat dan sepanjang sekat kanal yang dibuat. Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (Sipalaga) BRG periode 17 Februari hingga 2 Maret 2019, rata-rata tinggi muka air (TMA) di alat pemantau di Teluk Makmur dalam kondisi bahaya dengan ketinggian di angka -0,7 meter. TMA dalam kondisi bahaya berada di lebih dari -0,4 meter, kondisi siaga antara 0 hingga -0,4 meter, dan kondisi aman berada di 0 meter atau lebih. Faktor cuaca yang kering dengan dampak dari El Nino berkontribusi terhadap rendahnya TMA di Teluk Makmur dan akhirnya memicu kebakaran.

Mengembalikan kondisi gambut basah seperti sebelum degradasi terjadi memerlukan waktu.

Sementara infrastruktur sudah dibangun, faktor pemeliharaan agar infrastruktur pembasahan tetap berfungsi seperti yang diharapkan merupakan salah satu cara agar upaya mengembalikan kebasahan gambut masih berjalan di jalur yang diharapkan. Selain itu, temuan tim di lapangan menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar terhadap patroli dan upaya pencegahan kebakaran gambut di wilayah-wilayah rawan, terutama oleh MPA.

2. TERINTERVENSI RESTORASI DAN NON-KARHUTLA GAMBUT

Wilayah yang termasuk kategori ini adalah Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Program restorasi di Tanjung Leban dalam bentuk pembangunan infrastruktur pembasahan sudah dilakukan sejak 2014. Faktor waktu menjadi sebab dampak pembasahan yang sudah terlihat dengan tidak adanya karhutla di wilayah ini. Selain itu, peran dari perangkat desa dan MPA yang bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk dukungan operasional upaya pencegahan karhutla turut menjadi faktor penting tidak lagi ada kebakaran di wilayah terintervensi restorasi gambut di Tanjung Leban, Bengkalis, ini.

3. TERINTERVENSI RESTORASI DAN KARHUTLA GAMBUT DI WILAYAH TERJAUH

Wilayah yang termasuk kategori ini adalah:

- a. Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis
- c. Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Kegiatan restorasi gambut metode pembangunan infrastruktur pembasahan di tiga desa ini telah dilakukan. Meskipun tidak ada kejadian karhutla terpantau di wilayah yang dekat dengan infrastruktur pembasahan ini, kebakaran gambut masih terjadi di wilayah yang jauh dari lokasi terintervensi. Karhutla

yang terjadi di Desa Lukun pada Februari-Maret 2019 ini menarik untuk ditinjau lebih lanjut. Seluruh program restorasi di Lukun terpusat di wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk. Sementara itu, hanya terdapat satu sekat kanal yang tidak lagi berfungsi di wilayah yang jauh dari pusat desa dan rawan karhutla. Area rawan terbakar tapi minim intervensi ini terbakar besar-besaran pada Februari-Maret 2019.

Pembangunan infrastruktur pembasahan untuk mengembalikan kondisi gambut perlu difokuskan pada lokasi-lokasi yang memang rawan terjadi karhutla dan jauh dari jangkauan intervensi penanggulangan kebakaran. Lokasi yang jauh dari jangkauan warga sendiri sudah menyulitkan upaya patroli dan pencegahan karhutla. Tanpa infrastruktur pembasahan di lokasi tersebut, maka upaya reaktif ketika penanggulangan karhutla juga akan sulit dilakukan dan area terbakar akan lebih luas.

Tim tidak mengesampingkan bahwa perencanaan bukan satu-satunya faktor yang membuat infrastruktur pembasahan dibangun di wilayah yang mungkin tidak rawan terbakar. Perencanaan kegiatan restorasi metode pembasahan bisa jadi telah mempertimbangkan kerawanan suatu lokasi. Namun, dalam implementasinya verifikasi langsung di lapangan terkait kelayakan lokasi dan proses Padiatapa, juga menjadi faktor yang menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan sekat kanal sebaiknya tidak hanya mengambil titik tertentu yang paling rawan tapi secara menyeluruh di area yang rawan terbakar.

4. NON-INTERVENSI RESTORASI DAN KARHUTLA GAMBUT

Wilayah yang termasuk kategori ini adalah:

- a. Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- b. Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten

Bengkalis

- c. Kelurahan Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis
- d. Desa Sungai Sigajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir
- e. Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Belum adanya realisasi program restorasi gambut yang telah direncanakan di ketiga desa dan kelurahan di Rupert, yaitu Terkul, Teluk Lecah, dan Pergam, menjadi salah satu sebab karhutla di wilayah ini terus berulang. Perlu diperhatikan pula bahwa realisasi dari rencana restorasi gambut di tiga wilayah ini akan memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pelaksana kegiatan yaitu KLHK dan BRG dengan pihak swasta/perusahaan pemegang izin konsesi. Pasalnya, sebagian dari rencana restorasi di tiga wilayah ini bersinggungan atau berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Selain itu, koordinasi yang baik juga perlu ada mengingat pelaksanaan kegiatan restorasi di wilayah non-konsesi akan dilakukan melalui skema tugas pembantuan yang melibatkan unsur-unsur desa/kelurahan dan Pokmas di tingkat tapak yang memerlukan fasilitasi dan supervisi dari lembaga yang lebih tinggi, seperti KLHK, BRG, dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Partisipasi perangkat desa dan warga dalam mendukung restorasi dan mencegah terjadinya karhutla di gambut juga perlu didorong, misalnya melalui pelibatan ke dalam keanggotaan MPA atau unit lain yang berfokus pada pencegahan karhutla dan perlindungan ekosistem gambut.

Dua desa lainnya, yaitu Sungai Sigajah dan Tanjung Leban di Rokan Hilir termasuk ke dalam kategori non-intervensi restorasi dan masih terjadi karhutla karena kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan baru dilakukan pada Desember 2018. Karhutla di dua wilayah ini terjadi sebelum infrastruktur pembasahan dibangun, yaitu pada periode

Agustus-September 2018. Sebanyak 69 titik panas terpantau satelit pada 2018 di Sungai Sigajah dan 10 titik panas di Tanjung Leban. Pada periode Februari-Maret 2019, tidak terjadi kebakaran di dua desa ini. Keberadaan infrastruktur pembasahan gambut kemungkinan berkorelasi positif dengan penurunan/tidak adanya karhutla gambut di Sungai Sigajah dan Tanjung Leban. Namun, pemantauan lebih lanjut perlu dilakukan pada periode puncak musim kemarau Agustus-September 2019 untuk dapat menyimpulkan ada atau tidaknya korelasi positif tersebut. Dari pembagian kategori di atas, maka dapat diambil sejumlah tipologi kebakaran di wilayah gambut yang telah mendapat intervensi restorasi, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

NO.	DESA/ KELURAHAN	KARHUTLA	RENCANA RESTORASI	REALISASI RESTORASI	PERAN APARAT DESA	KETERSEDIAAN DANA UNTUK PATROL/ PENCEGAHAN/ PEMADAMAN	JARAK LOKASI TERBAKAR DENGAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN	KEPEMILIKAN WILAYAH TERBAKAR	TUTUPAN DAERAH TERBAKAR
1.	Teluk Makmur	V	V	V	V	X	+/- 5 meter	Individu	Akasia, semak
2.	Tanjung Leban (Bengkalis)	X	V	V (non-BRG)	V	V	-	-	-
3.	Terkul	V	V	X	V	X	(tidak ada infrastruktur)	Individu	Karet
4.	Teluk Lecah	V	V	X	V	X	(tidak ada infrastruktur)	Individu	Karet, sawit
5.	Pergam	V	V	X	V	X	(tidak ada infrastruktur)	Individu	Sawit
6.	Muara Dua	V	V	V	V	X	terdekat 2,9 km	Individu	Sawit
7.	Lukun	V	V	V	V	X	+/- 1 meter dari satu-satunya sekat dekat lokasi dan +/- 3 km dari sekat-sekat lain di dekat pemukiman warga	Individu, hutan desa	Sagu, Karet, Mengkuang
8.	Sungai Sigajah	X (tidak terbakar awal 2019)	V	V	V	X	N/A (tidak terbakar awal 2019)	-	-
9.	Teluk Nilap	V	V	V	V	X	+/- 5 km (dari jalan penghubung)	Individu	Sawit
10.	Tanjung Leban (Rokan Hilir)	X (tidak terbakar awal 2019)	V	V	V	X	N/A (tidak terbakar awal 2019)	-	-

PERSEPSI MASYARAKAT

Selain melakukan pengamatan atas kondisi biofisik infrastruktur pembasahan gambut, tim juga melakukan wawancara terstruktur dengan warga. Secara total, wawancara ini melibatkan 115 masyarakat di 10 desa. Sebagai caveat, penjelasan terkait temuan dari hasil wawancara terstruktur tidak dimaksudkan untuk menggambarkan suatu persepsi dalam keseluruhan populasi di desa terkait. Namun, temuan-temuan dari hasil wawancara terstruktur untuk menggali aspek sosial dan ekonomi dari karhutla dan restorasi gambut diharapkan dapat menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan di kemudian hari.

1. Pandangan atas keberadaan infrastruktur

Mayoritas infrastruktur yang ada di 10 desa dalam penelitian lapangan ini adalah sekat kanal. Oleh karena itu, bahasan atas persepsi masyarakat pada bagian ini merupakan refleksi atas keberadaan infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal. Dari hasil wawancara dengan responden, ada dua kelompok respon positif dari masyarakat. Pertama, masyarakat menganggap bahwa infrastruktur pembasahan berdampak positif terhadap penurunan kejadian kebakaran dan membantu ketersediaan air saat upaya pemadaman berlangsung. Kedua, pandangan positif juga terlihat dari anggapan bahwa infrastruktur menjaga lahan dari kekeringan sehingga terdapat tata kelola air yang baik bagi usaha perkebunan masyarakat.

Sementara itu, terdapat pula pandangan negatif atas keberadaan infrastruktur pembasahan gambut yang dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan besar. Pertama, masyarakat menganggap infrastruktur

pembasahan dibangun di wilayah yang jauh dari lokasi rawan kebakaran sehingga tidak berfungsi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Kedua, lokasi infrastruktur yang tidak tepat dianggap menjadi faktor penyebab perkebunan warga mengalami banjir pada saat musim hujan. Terkait dengan persepsi negatif ini, pelaksanaan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) perlu diperkuat sehingga dapat mengurangi pertentangan dan menampung aspirasi dari masyarakat atas program yang dilakukan.

2. Kebiasaan/perilaku di sekitar lahan dan dalam penggunaan api

Masyarakat sekitar lahan gambut masih memiliki beberapa kegiatan atau kebiasaan terkait penggunaan api yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sosialisasi pencegahan kebakaran gambut hendaknya juga menyentuh kebiasaan-kebiasaan setempat yang kemungkinan menjadi faktor pemicu terjadinya karhutla. Dari hasil wawancara dengan responden, untuk wilayah Riau kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah:

a. Merun

Merun merupakan kearifan lokal di mana masyarakat melakukan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, pembukaan lahan dengan cara ini menggunakan api secara terkendali, dalam area warga dengan luasan terbatas, dan melibatkan penjagaan penuh dari warga agar api tidak menyebar ke wilayah yang tidak diinginkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam merun ini adalah ketika pengendalian dan penjagaan api tidak dilakukan secara saksama.

b. Memancing

Parit/kanal/sungai yang ada di lahan gambut biasanya memiliki keragaman spesies ikan. Masyarakat di sejumlah desa yang dikunjungi di Riau dalam penelitian lapangan ini menyebutkan bahwa ada kebiasaan mencari ikan di lahan

gambut ini dengan istilah memancing di darat. Hal yang perlu diwaspadai dalam kebiasaan ini adalah memancing biasanya merokok sembari menunggu kail mendapat ikan. Puntung rokok yang tidak benar-benar dimatikan saat dibuang di sekitar lokasi pemancingan di gambut ini dapat menjadi salah satu pemicu karhutla yang meluas. Kebiasaan merokok dan membuang puntung rokok sembarangan ini juga perlu diperhatikan terkait dengan kebiasaan warga saat mencari getah.

c. Mencari madu

Kebiasaan masyarakat yang lain adalah mencari madu di hutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah metode pengasapan untuk mengusir lebah dari sarangnya sehingga bisa diambil. Penggunaan api yang tidak hati-hati saat pengasapan ini dapat menjadi salah satu faktor kebakaran gambut.

3. Dampak terhadap kehidupan/perekonomian sehari-hari

Kebakaran hutan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang terbakar. Pandangan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Asap menyebabkan penyakit ISPA

b. Jika wilayah yang terbakar merupakan lahan perkebunan sendiri, maka dampak ekonomi sangat besar bagi pendapatan. Beberapa warga juga mengaku jera menanam kembali di wilayah yang sering terbakar.

c. Kebakaran gambut mengganggu aktivitas masyarakat dan menyita banyak waktu dalam pemadaman api. Masyarakat yang ikut serta memadamkan api akan meninggalkan pekerjaan sehari-harinya sehingga membuat mereka tidak mendapatkan penghasilan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil analisis temuan lapangan di 10 desa di Riau, tipologi kebakaran gambut di wilayah terintervensi restorasi adalah:

- a. Wilayah terintervensi restorasi masih terbakar karena infrastruktur pembasahan belum dapat memulihkan kondisi gambut yang kering
- b. Wilayah terintervensi restorasi masih terbakar karena upaya pencegahan berbasis masyarakat, seperti MPA, terkendala dana operasional, sedangkan upaya penanggulangan terkendala lokasi yang jauh dan peralatan yang terbatas.
- c. Wilayah terintervensi restorasi gambut masih mengalami kebakaran di daerah yang jauh dari lokasi infrastruktur pembasahan dibuat atau lokasi infrastruktur pembasahan gambut tidak berada di wilayah yang rentan terbakar
- d. Wilayah yang seharusnya sudah mendapat intervensi restorasi masih terbakar karena rencana restorasi belum terealisasi

Di satu desa yang menjadi lokasi kunjungan dan pemantauan lapangan, yaitu Desa Tanjung Leban di Bengkalis, korelasi kegiatan restorasi hidrologis gambut berkorelasi positif dengan penurunan terjadinya karhutla. Namun, perlu dicatat bahwa korelasi positif ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup Panjang semenjak infrastruktur pertama dibuat, yaitu pada 2014. Titik panas terakhir yang terpantau di Tanjung Leban adalah 7 titik pada 2016.

Adanya korelasi positif ini didukung dengan peran serta perangkat desa dan masyarakat sekitar beserta pihak perusahaan untuk bersama melakukan upaya pencegahan karhutla.

Di dua desa lain dalam kunjungan lapangan, yaitu Sungai Sigajah dan Tanjung Leban, tim penelitian mengharapkan juga korelasi positif keberadaan infrastruktur dengan penurunan kejadian karhutla. Korelasi positif ini sudah mulai terlihat dengan tidak adanya lagi titik panas yang terpantau di dua desa tersebut pada periode awal tahun 2019. Infrastruktur pembasahan di dua desa ini dibangun pada akhir 2018. Pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah pada periode puncak musim kemarau pada Agustus-September 2019 ini, infrastruktur pembasahan di Sungai Sigajah dan Tanjung Leban di Rokan Hilir ini benar-benar berkorelasi positif dengan tidak adanya titik panas yang muncul di wilayah gambut yang rentan terbakar.

REKOMENDASI

Agar benar-benar efektif, upaya restorasi gambut melalui pembasahan kembali sebaiknya diikuti pula dengan upaya pencegahan karhutla dan pelibatan masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan, tipologi yang dibangun, dan persepsi masyarakat yang ditampung dalam penelitian lapangan ini, rekomendasi yang diajukan untuk para pemangku kepentingan utama restorasi gambut adalah:

1. Seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa restorasi gambut terealisasi sesuai rencana yang telah dibuat. Keterlambatan pelaksanaan restorasi telah terbukti berkontribusi terhadap kebakaran gambut di sejumlah wilayah yang seharusnya sudah terintervensi kegiatan restorasi
2. Memastikan bahwa infrastruktur pembasahan gambut dibangun di area terdegradasi yang rawan terjadi kebakaran, bukan hanya sebagai proyek percontohan yang dilakukan di dekat pemukiman warga
3. Perlunya ada indikator pulih yang dapat digunakan publik secara umum sehingga dapat turun berperan dalam memastikan infrastruktur pembasahan berdampak positif dan berkorelasi dengan penurunan kejadian kebakaran gambut
4. Memastikan pemeliharaan atas infrastruktur yang telah terbangun
5. Memastikan ada upaya patroli dan pencegahan karhutla yang dilakukan di tingkat tapak
6. Penguatan dukungan kepada desa-desa dan kelurahan-kelurahan rawan karhutla untuk mengalokasikan dana pencegahan karhutla
7. Mendorong desa/atau kelurahan beserta perangkat terkait, seperti MPA agar, dapat membuka kerjasama dengan lembaga sumber pendanaan non-anggaran lainnya
8. Supervisi dan penegakan peraturan atas rencana restorasi di wilayah konsesi
9. Meningkatkan implementasi Padiatapa sebelum pembangunan infrastruktur dilakukan
10. Sosialisasi pencegahan karhutla perlu memperhatikan lebih mendalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dapat memicu terjadinya kebakaran



pantau gambut

www.pantaugambut.id

2019